



2026

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN
MAROS, 2026**

TIM PENYUSUN:

Tim Pengelola Kerja BRPBAPPP Maros

SAMBUTAN KEPALA BALAI



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) tahun 2026 Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dapat terselesaikan dengan baik. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pencapaian visi dan misi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) selama tahun anggaran 2026, dengan metode penyajian mengacu pada

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I merupakan bentuk pertanggungjawaban BRPBAPPP dalam mewujudkan *good governance and good government* berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut diwajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai pejabat eselon II ke atas untuk mempertimbangkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Laporan kinerja ini mempunyai beberapa fungsi antara lain memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja tahun 2026 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRPBAPPP dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Selanjutnya, sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI secara umum dan BRPBAPPP pada khususnya, telah menerapkan metode pengukuran kinerja berbasis *Logical Framework Analysis* sesuai dengan peraturan Menteri KP RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Kinerja BRPBAPPP diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja (SK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BRPBAPPP tahun 2026 yang merupakan kontrak kinerja

tahunan. Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya pada tahun 2026.

Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kontribusi dan sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian kinerja BRPBAPPP ini, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya

Maros, 19 April 2026

Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya
Air Payau dan Penyuluhan Perikanan



A. Indra Jaya Asaad

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN:	ii
SAMBUTAN KEPALA BALAI	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
IKHTISAR EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN.....	2
C. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. KERAGAMAN SDM BRPBAPPP	10
E. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	20
F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
A. RENCANA STRATEGIS	24
B. VISI	29
C. MISI	30
D. TUJUAN.....	31
E. SASARAN	32
F. RENCANA KERJA TAHUN 2026	35
G. PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026	37
G. PENGUKURAN KINERJA	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. PRESTASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TRIWULAN I TAHUN 2026	42
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	46
C. CAPAIAN KINERJA BRPBAPPP	47
D. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBERDAYA BRPBAPPP	105
BAB IV PENUTUP	110
A. CAPAIAN KINERJA UTAMA	110
B. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	113
C. SARAN DAN REKOMENDASI	114
D. KESIMPULAN	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026	xii
Tabel 2. Pembagian Tugas Tim Kerja Lingkup BRPBAPPP	6
Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja	11
Tabel 4. Jumlah ASN BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2026	11
Tabel 5. Rekapitan Jumlah PNS Menurut Pangkat dan Golongan	12
Tabel 6. Rekapitan Jumlah ASN Berdasarkan Gender	13
Tabel 7. Rekapitan Jumlah ASN Menurut Jabatan	13
Tabel 8. Rekap Pegawai BRPBAPPP Maros Berdasarkan Jenjang Jabatan dan Pendidikan	14
Tabel 9. Rekapitan Pegawai BRPBAPPP Berdasarkan Kehadiran	15
Tabel 10. Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Lingkup BRPBAPPP Maros Triwulan I Tahun 2026	16
Tabel 11. Sebaran Penyuluh Perikanan BRPBAPPP Triwulan I TA. 2026	17
Tabel 12. Anggaran BRPBAPPP TA. 2025	21
Tabel 13. Rancangan Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2025-2029	26
Tabel 14. Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2026	34
Tabel 15. Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2026	35
Tabel 16. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Riset Pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I Tahun 2026 ..	35
Tabel 17. Perjanjian Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Pusat Penyuluhan Perikanan Triwulan I Tahun 2025 (Per Januari-Juni 2025) ..	38
Tabel 18. Data Anggaran Triwulan I TA. 2026 Lingkup BRPBAPPP	39
Tabel 19. Target IKU sampai Triwulan I TA. 2026	39
Tabel 20. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2026	44
Tabel 21. Capaian IKU Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I Tahun 2026	48
Tabel 22. Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	49
Tabel 23. Capaian Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	51
Tabel 24. Perbandingan Capaian IKU Triwulan I Tahun 2026 dengan Satker Lain ..	53
Tabel 25. Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	55
Tabel 26. Realisasi Capaian Berdasarkan Klasifikasi Kelas Dan Bidang Usaha Yang Disuluh Triwulan I Tahun 2026	56
Tabel 27. Realisasi Capaian Berdasarkan Klasifikasi Kelas Kelompok Yang Disuluh Triwulan I Tahun 2026	57
Tabel 28. Perbandingan Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok) dengan UPT Lain.	59

Tabel 29. Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	60
Tabel 30. Kelompok yang dibentuk berdasarkan bidang usahanya yakni :	63
Tabel 31. Perbandingan Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok) triwulan IV tahun 2025 dengan Satker Lain.	67
Tabel 32. Capaian IK Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBAPPP (Unit)	68
Tabel 33. Perbandingan Capaian IK ini dengan Satker Lain Lingkup Pusluh	70
Tabel 34. Capaian IK Media Penyuluhan Tersandar yang Disusun di BRPBAPPP (Paket)	71
Tabel 35. Capaian IK Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Model).....	72
Tabel 36. Capaian IK Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang).....	74
Tabel 37. capaian Indikator Kinerja Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	75
Tabel 38. Perbandingan Capaian IK ini dengan Satker Lingkup Pusluh KP.	77
Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja IK ini Pada Triwulan I tahun 2026	78
Tabel 40. Progress Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai) sampai dengan Maret 2026	79
Tabel 41. Capaian Indikator Kinerja (IK) Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP Triwulan I tahun 2026.....	80
Tabel 42. Capaian Indikator Kinerja NKPA Triwulan I TA 2026	82
Tabel 43. Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks).....	86
Tabel 44. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPBAPPP (Nilai).....	88
Tabel 45. Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%).....	89
Tabel 46. Perbandingan Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%) triwulan I tahun 2026 dengan Satker Lain.	91
Tabel 47. Capaian IK Proposal Inovasi Pelayanan Publik (Proposal).....	92
Tabel 48. Pagu dan Anggaran Triwulan I Tahun 2026	93
Tabel 49. Pagu dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025	93
Tabel 50. Revisi DIPA BRPBAPPP Triwulan I tahun 2026	93
Tabel 51. Evaluasi Renaksi pada Aplikasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026.....	95
Tabel 52. Perhitungan Efisiensi Anggaran BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2026	107
Tabel 53. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026	110

DAFTAR GAMBAR

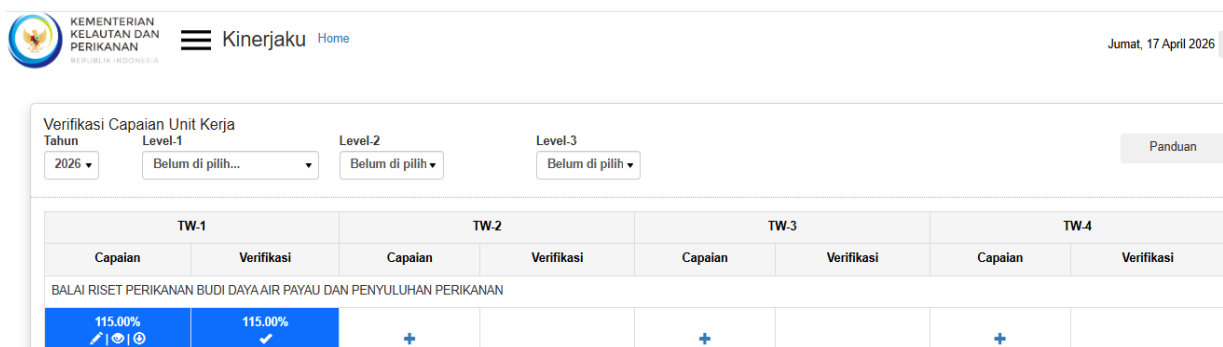
Gambar 2. Dashboard Kinerja Level 3 BRPBAPPP	ix
Gambar 3. Struktur Organisasi BRPBAPPP	3
Gambar 4. Capaian Kinerja IKU Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Dashboard Kinerja BRPBAPPP pada www.kinerjaku.kkp.go.id	42
Gambar 5. Daftar Capaian TW I Tahun 2026 Berdasarkan Dashboard Kinerja BRPBAPPP pada www.kinerjaku.kkp.go.id	43
Gambar 6. Kegiatan Penilaian Kelas pokdakan Bintang Timur Salekoa Kel Sidenre Kec Binamu.....	52
Gambar 7. Pendampingan akses informasi tentang program strategis nasional KP tentang pupuk bersubsidi dan sosialisasi Permen KP No 22 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi bagi pembudidaya ikan, akses teknologi TSFP udang windu II dan membahas akses bantuan dari BPAP Takalar di Desa Gentung tanggal 3 Februari 2026	58
Gambar 8. Pembentukan Pokdakan Chanos Chanos Balangkassa Dusun Balangkassa Desa Majannang Kec Maros Baru Kab Maros	64
Gambar 9. Kegiatan Pembentukan Koperasi Merah Putih Nelayan	69
Gambar 10. Screenshoot aplikasi SIDAK KKP satker BRPBAPPP Maros	76
Gambar 11. Surat Penyampaian Hasil PBJ Triwulan I Tahun 2026	90
Gambar 12. Dashbaord Kinerja Level 3 BRPBAPPP	110

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) dalam upaya untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan akuntabilitas kinerja di seluruh program kerja BRPBAPPP didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dengan metode *Logical Framework* yang diterapkan pada Rancangan Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2025-2029 yang diikuti dengan rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja tahunan secara konsisten dan berkesinambungan.

Merujuk pada PERMEN PanRB NO 88 Tahun 2021 mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka dibuatkan LKj dimana di dalamnya memuat perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan nilai akuntabilitas kinerja, Dan didukung pula oleh KEPMEN-KP Nomor 91/2024 mengenai Rencana Kerja KKP Tahun 2025.

Sehingga pada triwulan I tahun 2025, BRPBAPPP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja BRPBAPPP dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Aplikasi Kinerja dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPBAPPP di tingkat korporat selama triwulan I tahun 2026 sebesar 115% sebagaimana dashboard sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut :



Gambar 1. Dashboard Kinerjaku Level 3 BRPBAPPP

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <https://kinerjaku.kkp.go.id/> triwulan I TA 2026

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan telah menetapkan 2 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada triwulan I tahun 2026. Ketiga Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 Indikator Kinerja (IK). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh skor kinerja BRPBAPPP pada triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 115%, ada 6 IK yang memiliki capaian rata-rata sebesar 100%, 5 IK yang memiliki capaian lebih dari 100% berwarna biru dan 1 IK yang memiliki capaian sebesar 100%. Adapun rincian capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis, sesuai dengan nilai NKO :

1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, memiliki 7 Indikator Kinerja Pendukung, yaitu :
 - a) Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok) target triwulan I tahun 2026 sebesar 195 dimana target triwulan I tahun 2026 sebesar 5 kelompok, capaian sebesar 6 Kelompok (120%), berstatus Biru.
 - b) Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok) target tahun 2026 sebesar 5308 kelompok, dimana target triwulan I tahun 2026 sebesar 500 kelompok, capaiannya sebesar 600 Kelompok (104,17%), berstatus biru.
 - c) Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok) target tahun 2026, dimana target triwulan I sebesar sebesar 15 kelompok, capaian sebesar 19 kelompok (120%), berstatus Biru.
 - d) Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBAPPP (Unit) target tahun 2026, dimana target triwulan sebesar 20 unit, capaiannya sebesar 24 Unit (120%), berstatus biru.
 - e) Media Penyuluhan Terstandar yang disusun di BRPBAPPP (Paket) target tahun 2026 sebesar 1 Paket. Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.
 - f) Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Model) target tahunannya sebesar 1 Model. Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.
 - g) Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang) target tahun 2026 sebesar 6 orang. Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, memiliki 8 Indikator Kinerja Pendukung, yaitu :
- a) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%), target tahun 2026 sebesar 86% dan capaiannya sebesar 86% (100%) berstatus hijau.
 - b) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai) target tahun 2026 sebesar 92 Nilai Pengukurannya dilakukan persemester sehingga belum ada capaian.
 - c) Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai), target tahun 2026 sebesar 81 Nilai dan Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.
 - d) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai), target tahun 2026 sebesar 71,75 Nilai dan Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.
 - e) Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks), target tahun 2026 sebesar 82 Indeks dan Pengukurannya dilakukan persemester sehingga belum ada capaian.
 - f) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBAPPP (Nilai), target tahun 2026 sebesar 71 Nilai. Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.
 - g) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%), target tahun 2026 sebesar 77% dan capaian sebesar 100% (120%), berstatus biru.
 - h) Proposal Inovasi Pelayanan Publik (Proposal), target tahun 2026 sebesar 1 Proposal dan belum ada capaian.

Tabel 1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target MARET	Capaian MARET	%	Target s/d MARET	Capaian s/d MARET	%	Tgl Input
S.01	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						120,00			120,00		
IKSK.01.01	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	195,00	5,00	6,00	120,00	5,00	6,00	120,00	4/14/2026 13:53
IKSK.01.02	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5.308,00	500,00	600,00	120,00	500,00	600,00	120,00	4/14/2026 13:53
IKSK.01.03	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	676,00	15,00	19,00	120,00	15,00	19,00	120,00	4/14/2026 13:53
IKSK.01.04	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBAPP (Unit)	Unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	58,00	20,00	24,00	120,00	20,00	24,00	120,00	4/14/2026 13:53
IKSK.01.05	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBAPP (Paket)	Paket	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.01.06	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan oleh BRPBAPP (Model)	Model	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.01.07	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPP (Orang)	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	6,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
S.02	Kelautan dan Perikanan						110,00			110,00		
IKSK.02.01	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	86,00	86,00	100,00	86,00	86,00	100,00	4/14/2026 13:53
IKSK.02.02	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,10	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.02.03	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.02.04	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,75	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.02.05	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPP (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.02.06	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBAPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.02.07	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,00	77,00	100,00	120,00	77,00	100,00	120,00	4/14/2026 13:53
IKSK.02.08	Proposal Inovasi Pelayanan Publik (Proposal)	Proposal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <https://kinerjaku.kkp.go.id/> TW I TA. 2026

Meskipun kinerja BRPBAPP selama triwulan I tahun 2026 termasuk istimewa, namun dilihat dari NKO triwulan I tahun 2025 sebesar 111,67% dan NKO triwulan I Tahun 2026 sebesar 115% sehingga mengalami peningkatan NKO sebesar 3,33%, Beberapa permasalahan yang terjadi di pada tahun 2025 beserta rekomendasinya sebagai berikut :

- Belum terbit nomenklatur organisasi dan tata kerja BRPBAPP yang baru terkait perubahan tugas pokok dan fungsi BRPBAPP sehingga diperlukan koordinasi dengan Sekretariat BPPSDM KP KP maupun Pusat serta internal BRPBAPP

secara berkala untuk menyampaikan progress dan informasi terbaru terkait pembahasan nomeklatur organisasi dan tata kerja balai yang baru.

b) IKU dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan perlu dilakukan pengawalan ketat secara baik, guna memastikan capaian akhir tahun dapat terealisasi sesuai target yang telah disepakati.

c) Verifikasi capaian

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IKU, kegiatan verifikasi perlu dilakukan lebih disiplin dan lebih ketat utamanya IKU yang berkaitan dengan penyuluhan guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran kinerja dapat dilakukan secara disiplin dan tepat waktu.

Terkait permasalahan diatas, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh BRPBAPPP yakni :

1. Koordinasi dengan Sekretariat BPPSDM KP maupun Pusat serta internal BRPBAPPP secara berkala untuk menyampaikan progress dan informasi terbaru terkait pembahasan nomeklatur organisasi dan tata kerja balai yang baru.
2. Memonitoring IKU yang memiliki target tahunan sehingga bisa tercapai pada akhir tahun.
3. Sosialisasi dan Komunikasi dengan tim Pusluh dan Tim Monev Setba terkait Permen KP No 28 Tahun 2025

Laporan Kinerja ini diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh Stakeholder BRPBAPPP, Laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja BRPBAPPP

Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan sehingga capaian kinerja dari BRPBAPPP ini tidak hanya sebagai laporan saja, namun dapat memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja (LKj) triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkup BRPBAPPP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia berkualitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Arah kebijakan tersebut merupakan program presiden terpilih dan arah pembangunan jangka panjang nasional. Sasaran utama pembangunan nasional ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2029. Target yang akan dicapai pada tahun 2029 adalah:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju

GNI Per Kapita : 7.400-8.240

USD Kontribusi PDB Maritim :

9,1% Kontribusi PDB

Manufaktur : 21,9%

2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

4,5-5% (tingkat kemiskinan ekstrim 0%* di tahun

kedua) Rasio Gini 0,372-0,375

Kontribusi PDRB KTI 23,3 %

3. Kepemimpinan dan Pengaruh Dunia Internasional Meningkat

Global Power Index berada di rangking 29

4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai 0,59

5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*

Penurunan intensitas emisi GRK menjadi 2,37%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 77,20

Tahun 2025-2029 merupakan pentahapan pertama dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Tahap pertama RPJPN bertujuan untuk membentuk penguatan transformasi. Pada tahap pertama ini, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, kemiskinan menuju 0%, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. peningkatan kualitas sumber daya manusia

B. TUJUAN

Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2026 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BRPBAPPP ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian laporan kinerja triwulan I tahun 2026
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRPBAPPP untuk meningkatkan kinerja.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No : 75/PERMEN-KP/2020 adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan



Gambar 2. Struktur Organisasi BRPBAPPP

Sumber : Permen KP No. 74/PERMEN-KP/2020

Sesuai dengan ST Kepala BRPBAP3 Maros Nomor B.4512/BPPSDM-BRPBAPPP/KP.440/IX/2023 tanggal 11 September 2023 untuk mendukung tugas BRPBAPPP Maros, Kepala BRPBAPPP Maros dibantu oleh 2 timja yaitu Timja Manajerial (dengan jumlah anggota 79 orang) dengan uraian tugas dibawah ini :

- Pelaksanaan pemanfaatan aset dalam rangka pemenuhan target PNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Menjamin kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK
- Meningkatkan Profesionalitas ASN
- Penyelenggaraan SAKIP berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di satuan kerja BRPBAPPP serta menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon III untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik

- Memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari
- Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Itjen sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- Mengukur dan mengevaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA
- Menjalin kerja sama formal yang saling menguntungkan antara Satuan Kerja BRPBAPPP dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama.
- Melaksanakan kegiatan BRPBAPPP yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRPBAPPP berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- Mendukung administrasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan, menyusun rencana kerja dan membuat laporan kegiatan penyuluhan perikanan

Timja Penyuluhan (dengan jumlah anggota 605 orang) dengan uraian tugas yakni :

- Pendampingan kelompok,
- Penilaian kelas kelompok,
- Pendampingan akses modal,
- Pendampingan akses pasar,
- Pendampingan akses informasi/teknologi,
- Pembinaan UMKM dan Koperasi,
- Pendampingan kelompok penerima bantuan
- Meningkatkan kelas kelompok pelaku utama/pelaku usaha setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai KepMen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

- Membentuk kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan, dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
- Pendataan tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan
- Penerapan metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, seluruh peneliti dilingkungan BRSDM melakukan penyesuaian dengan melakukan perpindahan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga akan terjadi transformasi kelembagaan Pusat dan UPT lingkup BRSDM. Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi diLingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam bentuk Surat Tugas untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja pada BRPBAPPP. Sesuai dengan Surat Tugas Kepala BRPBAPPP nomor B.4512/BPPSD,-BRPBAPPP/KP.440/IX/2023 Tanggal 11 September 2023 menyebutkan bahwa memberi tugas kepada seluruh pegawai BRPBAPPP untuk 1) menjadi Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja; 2) memastikan pencapaian Indikator Kinerja dan pelaksanaan Uraian Fungsi dengan penuh tanggung jawab; dan 3) menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala BRPBAPPP. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja BRPBAPPP Nomor DIPA-032.12.2.403828/2022, tanggal 17 November 2022.

Susunan Keanggotaan Tim Kerja BRPBAPPP terdiri dari 2 (dua) tim kerja yakni :

1. Tim Kerja Manajerial dan
2. Tim Kerja Penyuluhan.

Masing-masing tim kerja memiliki ketua dan anggota dalam melaksanakan fungsinya.

Tim Kerja Manajerial memiliki fungsi sebagai koordinasi dan melaksanakan kegiatan manajerial. Dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 11 Indikator Kinerja Manajerial dan didukung juga dengan SDM yang terdiri dari 41 ASN, 1 orang P3K 39 PPNPN, 1 P3K, 37 orang Outsourcing. Sedangkan pada Tim Kerja Penyuluhan memiliki fungsi sebagai koordinasi dan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 7 Indikator Kinerja Utama dan SDM terdiri dari 598 orang penyuluh

Tabel 2. Pembagian Tugas Tim Kerja Lingkup BRPBAPPP

Kepala BRPBAPPP	:	Dr. A. Indra Jaya Asaad, S.Pi, M.Sc
Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	:	Anton Mulyawan, S.H
Ketua Tim Kerja Penyuluhan	:	Ansar, A.Md, S.I.Pust
Tim Sumber Daya Manusia dan Organisasi	:	Bimo Adi P, S.A.P, M.Tr.A.P (Koordinator)
Data Digital, KGB, KP, Pensiun, Pelaporan, SKP		Harasna, S.A.P
Presensi, Cuti, Surat Tugas, Tubel, SKP		Verawati, A.Md
Presensi, Uang Makan, Cuti, Surat Tugas, SKP		Ahmad Abdullah
SKP, LHKPN, SPT, TASPEN, BPJS		Dian Wahyuni Basri, S.T
IP ASN, Campaign		Siti Dwi Hadiyanti
KGB, KP, KJ, Penkom, Pensiun, Pelaporan, Portal		Wahida
Tim Keuangan	:	Tenri Santy Ridwan, S.Kel, M.Si (Koordinator)
SPIP, MR, PPK, LK		Andi Rudini, S.E
Penandatanganan SPM		Darseno, S.Pi
Bendahara Pengeluaran		Indira Mahmud, S.E
Bendahara Gaji		Ernawati, S.E
Bendahara Penerima, PNEP		Damir
Operator Persediaan, PUMK Kantor Maros		Harum
Operator SPM dan Perpajakan		Herman, S.E
Operator Pertanggungjawaban Belanja		Novita Prastiri, S.Si
Admin Unit PBJ		Tenri Bali, S.Kel
Operator Aplikasi Belanja Pegawai		Muhammad Rifqi, A.Md.Pi
PUMK Instalasi		Dedi, S.E
Tim Barang Milik Negara (BMN)	:	Darseno, S.Pi (Koordinator)
Operator Siman BMN		Tenribali, S.Kel
Operator Barang Persediaan		Harum
Tim Umum	:	Wahyudi (Koordinator)
Operator Instalasi Listrik dan Air		Ahmad Syafi M
Operator Jaringan Internet		Aripuddin
Operator Kebersihan Gedung dan Halaman		Tenri Bali, S.Kel
Tim Kendaraan Dinas	:	Muhammad Rusli (Koordinator)
Pencatatan Mobilisasi Kendaraan		Rahmat, Zaenal Rasyid
Pengemudi Pemeliharaan Kendaraan		Daswar, Nawir, Nurhijas, Farid
Tim Bimbingan Mental	:	Ansar, A.Md, S.I.Pust (Koordinator)
Kesiapan Acara		Saharuddin, S.Sos, M.A.P
Kesiapan Penceramah		Rasman, S.Pi
Pendanaan		Muhammad Fikram, S.M

Tim Keamanan	:	Anton Mulyawan, S.H (Koordinator)
Monitoring Pelaporan Keamanan		Saharuddin, S.Sos, M.A.P
Petugas Penjaga Keamanan Kantor dan Instalasi		Seluruh Petugas Keamanan
Tim Kebersihan	:	Tenri Bali, S.Kel (Koordinator)
Petugas Kebersihan Kantor dan Halaman		Seluruh Petugas Kebersihan
Tim Kearsipan	:	Halda, S.Sos (Koordinator)
Penataan Arsip, Saperas Arsip		Hiking M, S.Pi
Penataan Arsip Digital		Muhammad Hussin, A.Md
Penataan Arsip Manual		Zaenal Rasyid
Tim Persuratan/Portal KKP	:	Dedi, S.E (Koordinator)
Portal Kepegawaian		Wahida
Pendistribusian dan Penomoran Surat Manual		Muhammad Rizky, A.Md.Pi
Admin Portal Manajerial		Muhammad Fikram, S.M
Tim Program dan Anggaran	:	Ahmadirrahman Fajrihanif (Koordinator)
Operator, Admin Anggaran (RKA K/L)		Chairil Anwar, S.Kom
Tim Monev dan Pelaporan	:	Rahmadhany Natsir, S.Sos, M.M (Koordinator)
Monev		Saharuddin, S.Sos, M.A.P
Pelaporan		Nurhidayah, S.Pi, M.Si
Administrasi		Nurdianawati, S.T
Tim Pelaksanaan Penyuluhan	:	Ansar, A.Md, S.I.Past (Koordinator)
Kelompokan Kelompok, Data Penyuluhan		Hussin, S.M
Penyelenggaraan Penyuluhan		Ardi Bahhar, S.Si.Pi, M.Si
Admin Kelompokan		Nurhidayah, S.Pi, M.Si
Administrasi Penyuluhan, PUMK		Rian Irandi, S.E
Administrasi Penyuluhan		Muhammad Amran A, S.M
Tim Pengelola PPID	:	Rismawaty Mustari, S.E (Koordinator)
Penyiap Bahan Dokumen Pelayanan Lab dan PKL		Irmayani, S.Pi
Penyiap Bahan Dokumen Pelaporan		Chairil Anwar, S.Kom
Kompilator Dokumen		Najamuddin, S.Pd
Penyiap Bahan Dokumen Manajerial		SM Fuadi Marilah Asagga, S.E
Tim Pelayanan Publik	:	Endang Susianingsih, S.Pi, M.Si (Koordinator)
Pembina		Dr. A. Indra Jaya Asaad, S.Pi, M.Sc
Narahubung		Irmayani, S.Pi
Operator		Ardi Suci Elmida Sari, A.Md.Si
Penyiap Bahan		SM Fuadi Marilah Asagga, S.E

Tim Pelayanan PKL/Magang	:	Rasman, S.Pi (Koordinator)
Narahubung Eksternal, Seminar		Endang Susantingsih, S.Pi, M.Si, Rasman, S.Pi
Narahubung Internal (Lab/Instalasi/Manajerial)		Irmayanti, S.Pi, SM Fuadi Maristah Asagga, S.E
Kesiapan Sarpras, Ruangan dan Penginapan		Muhammad Rusli, Wahyudi
Pengolah Data, Pelaporan		Rismawaty Mustari, S.E, Najamuddin, S.Pd
Kesiapan Pembimbing, Rencana Kerja, Pelaporan		Maryam, S.T, Andi Bahtiar, S.St.Pi, M.Si
Tim Media Sosial	:	Najamuddin, S.Pd (Koordinator)
Pengelola Medsos		Andi Bahtiar, S.St.Pi, M.Si
Pelaku Pendukung Konten Medsos		Ahmadirahman Fajrihandi
Pelaku Pendukung Konten Medsos		Damir
Pelaku Pendukung Konten Medsos		Wahida
Pelaku Pendukung Konten Medsos		Ridwan R. (Dusdang)
Operator Medsos		SM Fuadi Maristah Asagga, S.E
Tim Pengelolaan Kerja Sama	:	Andi Bahtiar, S.St.Pi, M.Si (Koordinator)
Narahubung Stakeholder		Endang Susantingsih, S.Pi, M.Si
Admin, Pelaporan		Andi Suci Emma Sari, A.Md.Si
Instalasi Minipadi Maras	:	Makmur, S.Pi, M.Si (Koordinator)
1.Unit Sawah Konvensional		Darsono, S.Pi, Hussin, S.M, Anton Mulyawan, S.H
2.Unit Pembesihan Ikan Nila		Farid Mujahidin, Sigit, A.Md.Pi, Kihwan
3.Unit Minipadi Belut		Muh. Rusli, Suradi T, Muhammad Fikram, S.M
4.Unit Pakan (Alami dan Mandiri)		Muh. Rusli, Suradi T, Sigit, A.Md.Pi
Instalasi Kolam Terpal	:	A. Cakra Gunar Putra (Koordinator)
1.Budidaya Lele		SM Fuadi Maristah Asagga, S.E
2.Budidaya Ikan Nila		Amal Adis, S.Pi
Instalasi Pengolahan Produk Olahan IKP	:	Mujayana, A.Md, S.Pi (Koordinator)
Narahubung, Bahan Baku, Bahan Materi		Syakirah Syahrir, S.ST
Pelaksana Pelatihan/Percontohan Poldahsar		Resky Dwi Anggraeni, S.Tr.Pi
Pelaksana Pelatihan/Percontohan Poldahsar		A. Indah Anggraeni Abdy, S.Pi
Perlengkapan Kegiatan		Amal Adis, S.Pi
Sarpras,Mobilisasi, Penjualan Hasil Pengolahan		Farid Mujahidin
Persiapan Distribusi Bahan dan Hasil Pengolahan		Muhammad Fikram, S.M
Instalasi Silvofishery Marana	:	Iswahyuddin, S.Pi, M.Pi (Koordinator)
1.Unit Pembesihan Ikan Bandeng		Daniel, Hamzah, S.Pi, safar
2.Unit Pembesihan Kepiting		Hamzah, S.Pi, Sarnal
3.Unit Pendederan Ikan Bandeng		Daniel, Safar, Makmur, Agus Nawang, Aswir
4.Unit Pendederan Udang Windu		Safar, Nasaruddin, Rahman
5.Unit Budidaya Rumput Laut Polikultur Bandeng		Daniel, Iswahyudin
6.Unit Pembesaran Ikan Bandeng		Safar, Hamzah, S.Pi, Yonus

7. Unit Pembesaran Udang Windu	Safar, Asri, Ardi, Nasaruddin
8. Unit Pembibitan dan Penanaman Bakau	Iswahyuddin, S.Pi, M.Pi, Ardi, Yunus
9. Unit Usaha Garam	Safar, Jupri, Yusuf
10. Unit Pengolahan Produk Olahan KP	Syakirah Syahrir, Resky Dwi A, A. Indah, Muiyana
Instalasi Tambak Takalar	: Darsono, S.Pi (Koordinator)
1. Unit Pendederan Ikan Bandeng	Krisno, S.Pi, Ruslan
2. Unit Pendederan Udang Windu	Waldy Zainal, S.Pi Muhammad Resa, S.Pi
3. Unit Pembesaran Ikan Bandeng	Krisno, S.Pi, Muh. Rijal
4. Unit Pembesaran Kepiting Bakau	Agus Nawang, M.Si Krisno, S.Pi, Muhammad Resa, S.Pi
5. Unit Pembesaran Udang Vaname Semi Intensif	Krisno, S.Pi, Iham, S.Pi dan Semua Tim
6. Unit Pembibitan Bakau	Muhammad Resa, S.Pi, Waldy Zainal, S.Pi
7. Unit Pengolahan Produk Olahan KP	Muhammad Resa, S.Pi
8. Unit Instalasi Kelistrikan	Muhammad Rian Ashari
Instalasi Pembenihan Barru	: Muhammad Syakariah, S.Pi (Koordinator)
1. Unit Pembenihan Ikan Bandeng	Ramadhan, Harianto S, M Aswan, Adi Gunawan, Adrian S
2. Unit Pembenihan Kepiting	Muhammad Syakariah, Adi Gunawan
3. Unit Pembenihan Ikan Barong	Ramadhan, Adrian Saputra
4. Unit Pembenihan Udang Windu	Wendy S, Muh Afdhal, Alfian, Hasnah Useng
5. Unit Pembenihan Udang Vaname	Wendy S, Abd Asis Bahri, Muh. Fakhri, Alfian, Adam
6. Unit Pembesaran Ikan Barong	Ramadhan, Umar, Yusuf
7. Unit Pembesaran Ikan Bandeng	Ramadhan, Yusuf, Umar
8. Unit Pakan Alami	Abidin, Gustang, Wahyu Pratama, Nirmah, Nurul Rahma
9. Unit Pembibitan Bakau	Muhammad Syakariah, Yusuf, Wahyu Pratama, Adam
10. Unit Pengolahan Produk Olahan KP	Nurul Rahma, Nirmah
11. Unit Sarana dan Peralatan	Tahir Supu, Syamsu Rijal, Ahmad Akbar, Abidin
12. Unit Manajemen Air	Tahir Supu, Syamsu Rijal, Ahmad Akbar
13. Unit Layanan Tamu	Aswan, Nirmah, Hasnah Useng, Nurul Rahma
Laboratorium Pelatihan	: St. Saleha, S.T (Koordinator)
1. Laboratorium Kualitas Air	Andi Suci Ilmida Sari, St. Saleha, Muhammad Fikram
2. Laboratorium Kualitas Tanah	Maryam
3. Laboratorium Mikrobiologi	Siti Dwi Hadiyanti, Iffah Khumairah, Endang Susianingsih
4. Laboratorium Nutrisi, Pakan, Pangan, Garam	Dian Wahyuni, Nurhidayah, Muh. Rusli, Suradi T
5. Laboratorium Kualitas Rumpuk Laut	Nurdianawati, Iffah Khumairah, SM Fuadi Marislah A

Sumber : Surat Tugas Kepala BRPBAPPP nomor B.16/BRPBAPPP/KP.440/I/2026

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Setiap unsur di lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

D. KERAGAMAN SDM BRPBAPPP

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bidang riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan sesuai dengan PERMEN KP 75/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRPBAPPP. BRPBAPPP mengemban tugas sebagai balai riset perikanan budidaya air payau dan sebagai balai penyuluhan perikanan yang memiliki wewenang sebagai Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) penyuluhan perikanan yang terdiri dari 47 kabupaten/kota di 3 Provinsi, yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Dalam rangka mengakselerasi tugas BRPBAPPP tersebut, masing-masing pegawai/pejabat harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal. Masing-masing jabatan memerlukan kualifikasi tertentu dalam hal pengetahuan dan keterampilan, oleh karena itu perlu upaya peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan non formal diantaranya diklat, seminar, bimbingan teknis maupun sosialisasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Administrasi dan pengelolaan kepegawaian juga juga dituntut melakukan tugas pokok dan fungsinya secara cermat, untuk mendukung administrasi dan karier kinerja PNS berdasarkan sistem merit. Dalam sistem merit ini, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: tanggal/bulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, kenaikan gaji berkala, program pengembangan pegawai melalui tugas belajar, ijin belajar, pelatihan jabatan, pelatihan dan pendidikan keterampilan.

Kinerja suatu unit kerja dapat dicapai dengan optimal apabila masing-masing pegawai/pejabat melaksanakan tugas secara maksimal. Masing-masing jabatan memerlukan kualifikasi tertentu dalam hal pengetahuan dan keterampilan, maka perlu upaya peningkatan SDM melalui pendidikan non formal diantaranya diklat, bimbingan teknis maupun sosialisasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Dukungan sumber daya manusia pada program/kegiatan riset dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan mutlak sangat diperlukan. Pegawai BRPBAPPP memiliki berbagai latar belakang pendidikan dari tingkat dasar (SD). sampai dengan pasca sarjana (S3) yang ditempatkan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, Instalasi Tambak Silvofishery, Instalasi Perbenihan di Barru dan Instalasi Budidaya di Takalar. Jumlah pegawai Balai Riset Perikanan

Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros pada triwulan I tahun 2026 (PNS dan PPPK) berjumlah 705 orang, yang terdiri dari 76 orang ASN Manajerial (38 PNS, 26 P3K Full, 12 Paruh waktu), 563 ASN Penyuluh (370 PNS, PPPK Full 193 orang, Paruh Waktu 0 orang). Sementara tenaga Non ASN ada 66 orang terdiri dari PJLP 25 orang dan 41 Outsourcing Perusahaan. Masing-masing pegawai tersebut ditempatkan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, Instalasi Tambak Silvofishery, Instalasi Perbenihan di Barru dan Instalasi Budidaya di Takalar. Sedangkan para penyuluh perikanan tersebar di 3 Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja

No	Lokasi	PNS	CPNS	PPPK		Non ASN		Jumlah
				Penuh	Paruh Waktu	PJLP	OS	
1	Kantor BRPBAPPP Maros	30	0	17	1	10	25	83
2	Instalasi Pembenihan Barru	2	0	5	5	6	6	24
3	Instalasi Tambak Takalar	0	0	1	2	5	5	13
4	Instalasi Silvofishery Marana	2	0	0		4	5	11
5	Penugasan di Luar Balai dan Instalasi	4	0	3	4	0	0	11
6	Penyuluh Perikanan	370	0	193	0	0	0	563
Total		408	0	219	12	25	41	705

Sumber : data keragaan pegawai BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2026

Tabel 4. Jumlah ASN BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2026

No.	Pegawai	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PNS	412	412	408									
2.	CPNS	0	0	0									
3.	PPPK Penuh	219	219	219									
	PPPK Paruh Waktu	12	12	12									
4.	Non ASN (PJLP dan OS)	66	66	66									
	Jumlah	709	709	705									

Sumber : data keragaan pegawai BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2026

Kapasitas sumberdaya manusia dalam menunjang kegiatan BRPBAPPP merupakan faktor yang sangat vital untuk menghasilkan output yang berkualitas dan dapat diserap oleh *stakeholder*. Adapun total ASN (PNS dan PPPK) yang dimiliki oleh BRPBAPPP sampai dengan triwulan I tahun 2026 berjumlah 705 orang, yang

terdiri dari 408 orang, CPNS sudah tidak ada, P3K penuh sebanyak 219 orang, P3K Paruh Waktu sebanyak 12 orang dan Non ASN (PJLP dan OS) sebanyak 66 orang.

a. Menurut Golongan

Jumlah pegawai menurut golongan sebanyak 705 orang yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 4 orang dan golongan II sebanyak 4 orang dan golongan I tidak ada.

Tabel 5. Rekapitulasi Jumlah PNS Menurut Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Pegawai
1.	Pembina Utama	IV E	0
2.	Pembina Utama Madya	IV D	0
3.	Pembina Utama Muda	IV C	39
4.	Pembina Tingkat 1	IV B	63
5.	Pembina	IV A	23
6.	Penata Tingkat 1	III D	150
7.	Penata	III C	23
8.	Penata Muda Tingkat 1	III B	50
9.	Penata	III A	11
10.	Pengatur Tingkat 1	II D	19
11.	Pengatur	II C	27
12.	Pengatur Muda Tingkat 1	II B	2
13.	Pengatur Muda	II A	1
14.	Juru	I	0
	Jumlah		408

Sumber: data keragaan pegawai BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2026

b. Menurut Gender

Jumlah pegawai pada bulan Desember dilihat dari gender yaitu: Laki-laki berjumlah 389 orang dan perempuan 316 orang.

Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah ASN Berdasarkan Gender

No.	Pegawai	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	PNS	215	193	408
2.	CPNS	0	0	0
3.	PPPK	115	116	231
4.	Non ASN	59	7	66
	Jumlah	389	316	705

Sumber: data keragaan pegawai BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2026

c. Menurut Struktural dan Fungsional

Jumlah PNS menurut struktural dan fungsional sebanyak 408 orang yang terdiri dari : Struktural sebanyak 2 orang, fungsional sebanyak 381 orang dan non fungsional sebanyak 25 orang.

Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah ASN Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Pegawai
1.	Struktural	2
2.	Fungsional	381
2.	Non Fungsional	25
	Jumlah	408

Sumber : data keragaan pegawai BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2026

Pada periode pelaporan ini, terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian dalam pengelolaan kepegawaian. Pertama, dilakukan **pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional tertentu, yaitu Andi Bahtiar, S.St.Pi., M.Si.**, yang sebelumnya menjabat sebagai Pranata Humas Muda, kini diangkat menjadi Penyuluh Perikanan Muda. Selain itu, terdapat juga **pengangkatan pegawai dari jabatan Pranata Keuangan APBN Mahir menjadi Pranata Keuangan APBN Penyelia** atas nama **Indira Mahmud, S.E.**

Selanjutnya, dilaksanakan penataan dan penempatan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk penyesuaian kebutuhan organisasi. Dalam proses ini, dilakukan penyesuaian jabatan

nonfungsional terhadap 25 pegawai, yang terdiri atas 11 orang pada jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, 3 orang pada jabatan Pengelola Layanan Operasional, 8 orang pada jabatan Operator Layanan Operasional, serta 3 orang pada jabatan Pengadministrasi Perkantoran.

d. Menurut Pendidikan

Rincian jumlah PNS yang berjumlah 408 orang berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut: S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 70 orang, S1 sebanyak 257 orang, D4 sebanyak 16 orang, D3 sebanyak 33 orang, SMA sebanyak 31 orang.

Tabel 8. Rekap Pegawai BRPBAPPP Maros Berdasarkan Jenjang Jabatan dan Pendidikan

No.	Jabatan	Pendidikan								Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	SMA	SMP	SD	
1.	Kepala Balai	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Kepala Subbagian Umum	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Penyuluh Perikanan	-	61	242	16	31	20	-	-	370
4.	Instruktur	-	-	1	-	-	-	-	-	1
6.	Perencana	-	1	-	-	-	-	-	-	1
7.	Analisis SDM Aparatur	-	1	2	-	-	-	-	-	3
8.	APK APBN	-	1	2	-	-	-	-	-	3
9.	PK APBN	-	-	1	-	-	-	-	-	1
10.	Pranata Humas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Arsiparis	-	-	2	-	-	-	-	-	2
12.	Non Fungsional	-	6	6	-	2	11	-	-	25
Jumlah		1	70	257	16	33	31	0	0	408

Sumber : data keragaan pegawai BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2026

a. Ijin Belajar dan Tugas Belajar

Pada bulan ini, **belum ada pegawai yang melaksanakan izin belajar maupun tugas belajar** (nihil).

b. Penyesuaian Ijazah

Adanya **pegawai yang menyelesaikan pendidikan jenjang S1 sebanyak 4 Orang dan S2 sebanyak 8 Orang**, yaitu:

- 1) Damir, S.M
- 2) Aswar Rudi, S.Pi
- 3) Srieasuryaningsing, S.P
- 4) Abdul Hamid, S.Pi
- 5) Awaluddin Arif, S.Pi, M.Pi
- 6) Asriati, S.Pi, M.M, M.Pi
- 7) Hadasiah, S.Pi, M.Pi
- 8) Hasnah, S.Pi, M.Pi
- 9) Muliati Sahe, S.Pi, M.Pi
- 10) Siti Hajar, S.Pi, M.Pi
- 11) Suhartati, S.Pi, M.Pi
- 12) Raodah Salam, S.Pi, M.P

e. Menurut Kehadiran

Rincian pegawai BRPBAPPP berdasarkan kehadiran sebanyak 11 orang terdiri dari Cuti Tahunan sebanyak 9 orang (PNS sebanyak 6 orang dan P3K sebanyak 1 orang); Cuti Sakit PNS sebanyak 2 orang; Cuti Alasan Penting P3K sebanyak 1 orang; Cuti Besar sebanyak 1 orang PNS.

Tabel 9. Rekapitulasi Pegawai BRPBAPPP Berdasarkan Kehadiran

No	Lokasi	PNS	CPNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
1.	Cuti Tahunan	6	0	1	0	7
2.	Cuti Sakit	2	0	0	0	2
3.	Cuti alasan Penting	0	0	1	0	1
4.	Cuti Besar	1	0	0	0	1
5.	Cuti Melahirkan	0	0	0	0	0
6.	Cuti Diluar Tanggungan	0	0	0	0	0
7.	Ijin	0	0	0	0	0
Total		9	0	2	0	11

Sumber : data keragaan pegawai BRPBAPPP Desember Tahun 2025

f. Persebaran Penyuluh

Pegawai Penyuluhan Perikanan triwulan I tahun 2026 Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan sebanyak 563 Orang yang terdiri dari 370 orang Penyuluh Perikanan PNS dan 193 orang penyuluh perikanan PPPK yang tersebar di 47 (empat puluh tujuh) Kabupaten/Kota di 3 (tiga) Provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara lingkup Satuan Administrasi Pangkal Maros. Keberadaan Penyuluh Perikanan lingkup Satminkal BRPBAPPP Maros selalu dinamika jumlah maupun berubah lokasi penempatan wilayah kerja. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adanya penerimaan CPNS dan PPPK dengan formasi Penyuluh Perikanan, perpindahan/mutasi, Pensiun (BUP), dan meninggal Dunia serta adanya Rotasi yang dilakukan oleh Puslatluh KP. Adapun keragaan data Penyuluh Perikanan PNS di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros berdasarkan jenjang Jabatan Penyuluh Perikanan Per Provinsi dalam Triwulan I 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Lingkup BRPBAPPP Maros Triwulan I Tahun 2026

NO	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN	PROVINSI			JUMLAH
		SULAWESI SELATAN	SULAWESI BARAT	SULAWESI TENGGARA	
1	PP MADYA	85	3	31	119
2	PP MUDA	90	12	46	148
3	PP PERTAMA	113	21	65	199
7	PP PEMULA	0	0	1	1
8	ASISTEN PENYULUH PERIKANAN MAHIR	12	6	1	19
	ASISTEN PENYULUH PERIKANAN PENYELIA	8	1	4	13
	ASISTEN PENYULUH PERIKANAN TERAMPIL	47	10	7	64
Total Jumlah		355	53	155	563

Rancangan IK Tahun 2025-2029 Rekapitulasi Data Penyuluh Perikanan ASN

Keragaan Data Pegawai Penyuluh Perikanan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros Tahun 2025 yang tersebar di 47

Kabupaten/Kota di 3 Provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Sebaran Penyuluh Perikanan BRPBAPPP Triwulan I TA. 2026

PROVINSI	NO	KABUPATEN	STATUS PENYULUH		JUMLAH
			PNS	PPPK	
Sulawesi Selatan	1	BANTAENG	4	6	10
	2	BARRU	17	2	19
	3	BONE	23	6	29
	4	BULUKUMBA	9	9	18
	5	ENREKANG	6	2	8
	6	GOWA	12	3	15
	7	JENEPONTO	12	8	20
	8	KEPULAUAN SELAYAR	6	7	13
	9	LUWU TIMUR	4	2	6
	10	LUWU UTARA	5	4	9
	11	LUWU	19	3	22
	12	MAROS	13	6	19
	13	PANGKEP KEPULAUAN	14	10	24
	14	PINRANG	26	5	31
	15	SIDENRENG RAPPANG	7	1	8
	16	SINJAI	14	6	20
	17	SOPPENG	3	4	7
	18	TAKALAR	9	11	20
	19	TANA TORAJA	2	1	3
	20	TORAJA UTARA	2	1	3
	21	WAJO	11	4	15
	22	KOTA MAKASSAR	6	9	15
	23	KOTA PALOPO	12	2	14
	24	KOTA PARE-PARE	6	1	7
Sulawesi Tenggara	25	BAUBAU	5	4	9
	26	BOMBANA	5	5	10
	27	BUTON SELATAN	1	4	5

PROVINSI	NO	KABUPATEN	STATUS PENYULUH		JUMLAH
			PNS	PPPK	
	28	BUTON TENGAH	2	2	4
	29	BUTON UTARA	3	4	7
	30	BUTON	1	1	2
	31	KENDARI	14	5	19
	32	KOLAKA TIMUR	2	0	2
	33	KOLAKA UTARA	5	2	7
	34	KOLAKA	8	6	14
	35	KONAWA KEPULAUAN	2	0	2
	36	KONAWA SELATAN	7	8	15
	37	KONAWA UTARA	5	2	7
	38	KONAWA	17	2	19
	39	MUNA BARAT	4	3	7
	40	MUNA	16	6	22
	41	WAKATOBI	1	3	4
Sulawesi Barat	42	MAMASA	8	2	10
	43	MAJENE	1	4	5
	44	MAMUJU	9	5	14
	45	MAMUJU TENGAH	1	2	3
	46	PASANGKAYU	5	3	8
	47	POLEWALI MANDAR	6	7	13
TOTAL JUMLAH			370	193	563

Aset/ Sarana Prasarana

Potensi dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan meliputi sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, serta anggaran yang mendukung kegiatan. Sumberdaya manusia yang mendukung BRPBAPPP terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, serta pejabat fungsional umum yang mendukung pelaksanaan kegiatan BRPBAPPP sebagaimana yang disebutkan pada keragaan SDM sebelumnya.

Prasarana dan sarana pendukung untuk kegiatan BRPBAPPP antara lain adalah tanah, bangunan kantor, hatchery dan kolam percobaan untuk menghasilkan teknologi budidaya air payau yang aplikatif dan efisien, ruang pertemuan, perpustakaan, dan laboratorium terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Penguji karena telah menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2005). Beberapa laboratorium yang dimiliki oleh BRPBAPPP antara lain adalah : (1) Lab Reproduksi dan Genetika Ikan, (2) Lab Nutrisi dan Teknologi Pakan, (3) Lab Lingkungan dan Toksikologi, dan (4) Lab Kesehatan Ikan. Beberapa aset yang dimiliki oleh BRPBAPPP s/d akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut.



Sumber : Data BMN Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Output	Satuan	Target	Capaian
1	Optimalisasi aset			
a.	Instalasi Minapadi Maros (luas total : 24 Ha)	%	100	100
b.	Instalasi Tambak Marana (46 Ha)	%	100	100
c.	Instalasi Tambak Takalar (luas total 12 Ha)	%	50	50
d.	Instalasi Pembenihan Barru (luas total: 9 Ha)	%	100	100

Sumber Data BMN BRPBAPPP Tahun 2026

E. POTENSI DAN PERMASALAHAN

a) Potensi

Keberadaan SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

BRPBAPPP melaksanakan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan didukung dengan teknologi yang ada di Balai dengan ditetapkan sebagai satuan administrasi pangkalan (satminkal) untuk penyuluhan kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan di ketiga provinsi tersebut didukung oleh 563 penyuluh perikanan.

Kegiatan di BRPBAPPP didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana yang sebagian besar ruang lingkupnya sudah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Penguji karena telah menerapkan secara konsisten *SNI ISO/IEC 17025:2008* (*ISO/IEC 17025:2005*). BRPBAPPP memiliki 5 laboratorium penguji dengan 25 ruang lingkup. Namun pada tahun 2022 telah dilakukan pengalihan tugas dan fungsi riset dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sesuai dengan Peraturan No 33 Tahun 2021 tentang “Badan Riset di bidang Perikanan Air Payau”. Lingkungan strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh BRPBAPPP meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) BRPBAPPP, sedangkan faktor-faktor strategis eksternal berhubungan dengan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) BRPBAPPP. Selanjutnya dilakukan analisis *SWOT* yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menentukan arah kebijakan dari BRPBAPPP kedepannya.

Beberapa arah kebijakan BRPBAPPP yang terkait kegiatan penyuluhan yang selaras dengan kebijakan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP serta mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain adalah:

1. Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan Kelautan dan Perikanan.

2. Penataan Kebijakan Penyuluhan KP, melalui penyelesaian legislasi: Kebijakan dan Strategi Penyuluhan KP, Mekanisme 42 Penyelenggaraan Penyuluhan KP, Kelembagaan, Sarpras, Metoda dan Materi, dan Pola Diklat Penyuluh.
3. Penguatan kelembagaan penyuluhan KP, meliputi sinergitas dan koordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat regional dan pemerintah daerah, serta penguatan kelompok pelaku utama perikanan.
4. Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan melalui Pengembangan materi penyuluhan bentuk cetak, CD video, web; Penyuluhan dengan media cetak, tertayang dan terdengar, Pemanfaatan sms *gateway*, *web (cyber extension)*; dan Temu: aplikasi, percontohan, dan lain-lain.

Anggaran untuk kegiatan penyuluhan perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini berasal dari Pusat Penyuluhan KP. Penganggaran BRPBAPPP sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menggunakan pendekatan penganggaran terpadu (*unified budget*), kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*), dan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Anggaran untuk kegiatan riset perikanan dan penyuluhan perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran BRPBAPPP pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Anggaran BRPBAPPP TA. 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Pegawai	105.015.067.000
2	Belanja Barang	9.494.575.000
3	Belanja Modal	0
Total Anggaran		114.509.642.000

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#span/dataDIPA/DataRealisasi>

Pada triwulan I tahun 2026 pagu anggaran BRPBAPPP adalah sebesar Rp.114.509.642.000,- Untuk melaksanakan fungsinya dalam melakukan penyuluhan, BRPBAPPP memiliki penyuluh perikanan yang telah melakukan tugas pada periode 2026 diantaranya sebagai berikut:

-  Pendampingan Kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR) dalam akses teknologi, informasi dan permodalan usaha KP;

- ✚ Penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR);
- ✚ Pendampingan bantuan pemerintah (asuransi nelayan/pembudidaya ikan, sertifikat tanah nelayan, sarana alat tangkap ikan, minapadi, bioflok, integrasi lahan garam rakyat, ice flake, dll.);
- ✚ Pendirian Koperasi (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam);
- ✚ Legalisasi Izin Usaha Mikro dan Kecil/IUMK sektor KP) (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam);
- ✚ Sosialisasi peraturan per-UU perikanan;

b) Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program penyuluhan Perikanan untuk mendukung pembangunan KP yakni :

1. Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan.
2. Telah dikeluarkannya Perka.badan No 63/tahun 2022 dan Keputusan Kepala Balai No. 184 Tahun 2025 mengenai tentang “Penetapan Penyuluh Perikanan ASN Tahun 2025” dan Perka badan No 9 Tahun 2025 tentang Penyuluh Perikanan Bantu, masih banyak penyuluh yang belum mengerti sehingga perlu sering melakukan Sosialisasi dan berkoordinasi lebih lanjut.
3. Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota yang memiliki potensi perikanan;
4. Sistem monitoring terhadap penyuluhan perikanan masih belum memadai karena cakupan wilayah terlalu luas dengan anggaran monitoring yang masih kurang memadai.

F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif , pada bab ini berisi ringkasan dari laporan ini antara lain berisi uraian singkat tentang sasaran capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2025

2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang BRPBAPPP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, keragaan pegawai di BRPBAPPP.
3. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis BRPBAPPP 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja BRPBAPPP Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
5. Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
6. Lampiran, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dari hal lain yang dianggap penting.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sektor kelautan dan perikanan memegang peran penting dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional. Peran strategis tersebut selaras dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0%, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan pengelolaan laut dan perikanan yang berkelanjutan, inovatif, dan berbasis kesejahteraan, sektor ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Perekonomian nasional diarahkan untuk tumbuh melalui sektor kelautan dan perikanan sebagai engine of growth. Produktivitas hasil perikanan ditingkatkan, sumber pertumbuhan baru dioptimalkan, dan nilai tambah diciptakan sehingga memberikan multiplier effect yang luas. Agenda penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui pendekatan inklusif yang menjangkau nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah, pemasar, serta masyarakat pesisir yang rentan terhadap bencana iklim. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan peran SDM yang inovatif, kompeten dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diwujudkan melalui pendidikan, pelatihan, vokasi, dan penyuluhan yang sesuai kebutuhan industri, diperkuat dengan standardisasi serta sertifikasi kompetensi agar SDM kelautan dan perikanan dan pelaku usaha memiliki daya saing tinggi, adaptif terhadap teknologi, serta relevan dengan tuntutan pasar kerja.

Paradigma lama yang menitikberatkan pada peningkatan volume produksi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan perlu ditinggalkan. Landasan pembangunan baru berorientasi pada ekonomi biru dengan prinsip ekologi sebagai panglima serta penyiapan SDM inovatif, kompeten, dan berdaya saing. Pendekatan ini menekankan pembangunan berkelanjutan, pengendalian tekanan ekosistem, peningkatan nilai tambah, serta penggunaan teknologi yang terukur, efisien, dan bertanggung jawab.

Paradigma ekonomi biru diwujudkan melalui lima kebijakan utama: (1) perluasan kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona; (3) pengembangan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil; dan (5) pengurangan sampah plastik laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan SDM yang inovatif, kompeten dan berdaya saing untuk mensukseskan kebijakan Blue Economy KKP.

1. Penyuluhan KP dengan pendekatan Super Extension (Suggestive, Useful, Performative, Effective, Reliable);
2. Pendidikan KP melalui pengembangan Ocean Institute of Indonesia (OII);
3. Pelatihan KP berbasis Corporate University dan Community Learning Center;
4. Standarisasi dan Sertifikasi SDM KP melalui Certification Agency (Certifa).

Keberadaan BRPBAPPP sendiri memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP dan BPPSDMKP melalui kegiatan penyuluhan perikanan sebagai berikut :

1. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;
2. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
4. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

Salah satu kenyataan yang dihadapi pada sektor perikanan umumnya usaha perikanan didominasi oleh usaha skala kecil, tingkat pendidikan pembudidaya ikan, pengolah ikan maupun nelayan (pelaku utama) masih rendah, dan bermodal kecil. Kondisi dengan skala usaha kecil umumnya belum mampu menerapkan teknologi inovatif sehingga menjadi kurang efisien dan akan berakibat pada penurunan kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan. Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku

pelaku utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan non formal bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya

Dalam rangka mendukung program utama BPPSDMKP yang salah satunya adalah “Penyuluhan KP dengan pendekatan Super Extension (Suggestive, Useful, Performative, Effective, Reliable)” maka BRPBAPPP menyusun Rancangan Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025-2029 sebagai pengganti Renstra BRPBAPPP untuk periode tahun 2025-2029. Pada rancangan ini meliputi kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja beserta targetnya pada tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 13. Rancangan Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP	4580	5005	5005	5005	5005
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBAPPP	168	168	168	168	168
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP	497	510	510	510	510

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
		4	Nilai PNBP Satker BRPBAPPP	0,94	1.630 5	1.712 0	1.724 3	1.810 6
		5	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP	43	43	43	43	43
	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BRPBAPPP	1	1	1	1	1
		7	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)	3	3	3	3	3
	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	8	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP	4	18	20	20	20
		9	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan	12	12	15	15	15

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2026	2029
			Teknis di BRPBAPPP					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP	1	1	1	1	1
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP	85	85	85	85	85
		12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP	92	92	92	92	92
		13	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP	81	81	81	81	81
		14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5
		15	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP	81	82	82	83	83
		16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan	80	85	85	85	85

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
			pada SIRUP BRPBAPPP					
		17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPBAPPP	80	80	80	80	80

Sumber : Renstra BRPBAPPP Tahun 2020-2024 dan Reviu Renstra BRPBAPPP Tahun 2020-2024

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, seluruh peneliti dilingkungan BPPSDM melakukan penyesuaian dengan melakukan perpindahan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga akan terjadi transformasi kelembagaan Pusat dan UPT lingkup BPPSDM dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 6“ Badan Riset Sumberdaya Manusia (BPPSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM). Sampai Triwulan I Tahun 2026, KKP masih memproses Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPPSDM untuk level Eselon 2 dan Unit Pelaksana Teknis masih berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020. Namun demikian telah dilakukan penyusunan Renstra BPPSDM yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja BPPSDM.

B. VISI

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Rumusan ini mencerminkan aspirasi nasional untuk menempatkan Indonesia sebagai negara maju yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menjelang satu abad kemerdekaan. Pembangunan sumber daya manusia ditempatkan sebagai prioritas utama yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan ketahanan bangsa di tengah perubahan global yang cepat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian visi nasional tersebut. Untuk periode 2025–2029, KKP merumuskan visi “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menekankan bahwa keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bukan hanya menjadi pilar ekonomi nasional, melainkan juga instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat basis ekonomi biru Indonesia.

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) merumuskan visi spesifik, yaitu “Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”. Visi tersebut menegaskan peran fundamental BPPSDMKP dalam membangun kapasitas manusia yang mampu menjawab tantangan kontemporer sektor kelautan dan perikanan. SDM yang inovatif akan mendorong lahirnya kreativitas serta adaptasi terhadap dinamika perubahan. SDM yang dimaksud adalah SDM pelaku usaha yang inovatif dan berdaya saing serta SDM calon tenaga kerja yang kompeten yang akan memastikan relevansi keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). SDM yang berdaya saing memperkuat posisi Indonesia dalam arena global yang sarat kompetisi.

Visi BRPBAPPP adalah mendukung visi BPPSDMKP yang berlandaskan pada visi KKP yaitu “Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”.

C. MISI

KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari 8 Asta Cita, dengan focus pada Misi Asta Cita ke 2,5 dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. “ Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;

2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2,3,5, dan 6
3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Dalam melaksanakan misi KKP yang ke-3 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan perikanan”, dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu *“Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”*.

Misi BRPBAPPP adalah mendukung misi BPPSDMKP yang berlandaskan pada Misi KKP yaitu “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan perikanan”, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu “Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional” melalui pendampingan kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan BRPBAPPP yang meliputi 47 kabupaten/kota di 3 Provinsi, yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

D. TUJUAN

Untuk mewujudkan Misi BPPSDM Tahun 2025-2029 disusun tujuan yaitu **“Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP yang Inovatif, Kompeten dan Berdaya Saing”** dengan indikator meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP dari 70 pada tahun 2025 menjadi 2029.

Fokus utama tujuan strategis terletak pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang inovatif, kompeten, dan berdaya saing. Pencapaian tujuan ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru yang inovatif dan berdaya saing, kelembagaan kelompok pelaku usaha yang kuat dan mandiri serta menghasilkan calon wirausaha muda baru yang berlatar belakang pendidikan serta menjawab kebutuhan calon tenaga kerja melalui adanya keterhubungan lebih kuat antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha, dunia industry dan dunia kerja (DUDIKA). Selain itu, tujuan juga diarahkan untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Strategis Penyuluhan KP yakni Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna oleh pelaku usaha mikro dan kecil sector, serta pelaku pendukung sector KP; Memperluas akses pelaku usaha mikro kecil KP pelaku pendukung sector KP terhadap lembaga permodalan, pasar, serta perizinan berusaha; Mendorong kepedulian pelaku usaha terhadap keberlanjutan sumber daya dan kelestarian lingkungan pesisir; Dan Memperkuat posisi tawar pelaku usaha KP melalui penguatan kelembagaan. Arah yang dicapai yakni : Peningkatan kapasitas usaha dan aksesibilitas kepada berbagai kelembagaan serta usaha yang dilakukan dapat dipastikan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah naungan BPPSDMKP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029 harus mampu menjalankan tujuan dari BPPSDMKP tersebut. Tujuan yang ingin dicapai BRPBAPPP selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan kesejahteraan pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sector kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
2. Membuat inovasi teknologi hasil percontohan penyuluhan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sector kelautan dan perikanan.
3. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BRPBAPPP.

E. SASARAN

Pada triwulan I tahun 2026 ini, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dan 15 (lima belas) indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan pada perjanjian kinerja sebagai bentuk dukungan untuk mencapai sasaran strategis pada level 0 Kementerian Kelautan dan Perikanan, sasaran program pada level 1 BPPSDMKP, serta sasaran kegiatan pada level 2 Pusat Penyuluhan KP. Dari 5 (lima) sasaran strategis pada level 0 KKP dan 15 (lima belas) indikator kinerja, BRPBAPPP mendukung 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja, sebagai berikut:

1. **SS4.** Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
IK13. Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

2. SS5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas

IK14. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP

Sedangkan dari 2 (dua) sasaran program dan 3 (tiga) indikator kinerja program pada level 1 BPPSDM, BRPBAPPP mendukung 2 (dua) sasaran program dan 2 (dua) indikator kinerja program, yaitu:

1. SP1.Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

IKP2.Persentase Peningkatan Omzet pada Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya.

2. SP2.Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan IKP3.Nilai implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Badan Penyuluhan dan Perikanan.

IKP3. Nilai implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2026 terdapat perubahan organisasi dan tata laksana lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 tahun 2025, dimana terdapat 5 (lima) eselon II di lingkup BPPSDMKP, yaitu :(1)Sekretariat BPPSDMKP, (2)Pusat Penyuluhan KP, (3)Pusat Pendidikan KP, (4)Pusat Pelatihan KP, dan (5)Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan karena memiliki tugas pokok dan fungsi kegiatan penyuluhan, sehingga berada dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP.

Dalam rangka menindaklanjutiMenindaklanjuti Surat Sekretaris BPPSDM Nomor B.70/BPPSDM.2/RC.610/II/2026, tanggal 20 Januari 2026 perihal Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja UPT Lingkup Pusluh KP Tahun 2026, maka perjanjian kinerja triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 14. Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	195
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	5308
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	676
		4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBAPPP (Unit)	58
		5	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBAPPP (Unit)	1
		6	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)	1
		7	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)	6
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	92,1
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	81
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	71,75
		12	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	82
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBAPPP	71
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	77
		15	Proposal Inovasi Pelayanan Publik (Proposal)	1

Sumber: PK Januarii 2026

F. RENCANA KERJA TAHUN 2026

Rencana kinerja tahunan pada dasarnya adalah dokumen perencanaan awal yang merepresentasikan rencana tekad dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ditelitinya sesuai dengan rencana kinerja Pemerintah.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2026 meliputi 2 (dua) program yaitu : Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan Program Dukungan Manajemen dengan rincian pagu kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.801.002.000,-
2. Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 110.706.640.000,- .

Untuk realisasi per tanggal 30 Maret 2026 realisasi anggaran adalah sebesar 27.156.893.984,- (23,45%)- yang berasal dari total pagunya sebesar Rp. 114.509.642.000,- Belanja pegawai realisasi sebesar Rp 25.661.721.022,- (24,43%)- dengan pagu sebesar Rp. 105.015.067.000,- Belanja barang realisasi sebesar Rp 1.496.193.327,- (87,01%) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.494.575.000,- (15,75%).

Tabel 15. Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.000)	Revisi Anggaran TW I (Rp.000)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.298.565	3.801.002
2	Program Dukungan Manajemen	111.221.057	110.708.640

Sumber : RKAKL Maret 2026

Rencana kinerja triwulan ini Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan tahun 2025 terdiri dari sasaran, indikator dan target triwulan I tahun 2026 yang didasarkan pada dokumen SMART. Target ditetapkan untuk indikator kinerja utama sebagai output kinerja tahun 2025 yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 16. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Riset Pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	195
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	5308
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	676
		4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBAPPP (Unit)	58
		5	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBAPPP (Unit)	1
		6	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)	1
		7	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)	6
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	92,1
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	81
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	71,75
		12	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	82
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBAPPP	71
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	77
		15	Proposal Inovasi Pelayanan Publik (Proposal)	1

Sumber : RKT Jan-Maret 2026

G. PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap instansi Pemerintah wajib menyusun perjanjian kinerja berdasarkan alokasi anggaran yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: 1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, 2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, 4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan 5) sebagai dasar pemberian *reward and punishment*. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2026 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Perjanjian kinerja tahun 2026 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang dijabarkan sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA BRPBAPPP DENGAN PUSAT PENYULUHAN

Menindaklanjuti Menindaklanjuti Surat Sekretaris BPPSDM Nomor B.70/BPPSDM.2/RC.610/I/2026, tanggal 20 Januari 2026 perihal Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja UPT Lingkup Pusluh KP Tahun 2026, maka perjanjian kinerja triwulan I tahun 2026, BRPBAPPP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala BRPBAPPP dengan Kepala Pusat Penyuluhan Perikanan. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (*strategy map*) dengan 4 sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU BRPBAPPP pada triwulan I tahun 2026 untuk semua SS berjumlah 2 yang terdiri dari 15 IK. Adapun perincian Perjanjian Kinerja BRPBAPPP dengan Pusat Penyuluhan pada triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 17. Perjanjian Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Pusat Penyuluhan Perikanan Triwulan I Tahun 2025 (Per Januari-Juni 2025)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	195
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	5308
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	676
		4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBAPPP (Unit)	58
		5	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBAPPP (Unit)	1
		6	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)	1
		7	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)	6
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	92,1
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	81
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	71,75
		12	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	82
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBAPPP	71
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	77
		15	Proposal Inovasi Pelayanan Publik (Proposal)	1

Sumber : Perjanjian Kinerja Januari 2025

Tabel 18. Data Anggaran Triwulan I TA. 2026 Lingkup BRPBAPPP

No.	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	3.228.585.000
2	Program Dukungan Manajerial	111.221.057.000
Total Anggaran Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan		114.509.642.000

Sumber : Perjanjian Kinerja Januari 2026

Tabel 19. Target IKU sampai Triwulan I TA. 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pola Hitung	Frekuensi	TW I	TW II	S.D. TW II/ SEMESTER I	TW III	S.D. TW III	TW IV	S.D. TW IV/ SEMESTER II/ TAHUNAN
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	195	Nilai Posisi Akhir	Triwulanan	5	20	20	75	75	195	195
2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	5308	Nilai Posisi Akhir	Triwulanan	500	2000	2000	4000	4000	5308	5308
3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	676	Nilai Posisi Akhir	Triwulanan	15	200	200	400	400	676	676
4	Gabungan Kelompok dan/atau koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP di BRPBAPPP (Unit)	Unit	58	Nilai Posisi Akhir	Triwulanan	20	30	30	45	45	58	58
5	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBAPPP (Unit)	Unit	1	Nilai Posisi Akhir	Tahunan	0	0	0	0	0	1	1
6	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Paket	1	Nilai Posisi Akhir	Tahunan	0	0	0	0	0	1	1
7	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)	Orang	6	Nilai Posisi Akhir	Tahunan	0	0	0	0	0	6	6
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	%	86	Nilai Posisi Akhir	Triwulanan	86	86	86	86	86	86	86
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)		92,1	Nilai Posisi Akhir	Semesteran	0	84	84	0	0	92.1	92.1
10	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	81	Nilai Posisi Akhir	Tahunan			0		0		81
11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	71,75	Nilai Posisi Akhir	Tahunan	0	0	0	0	0	71.75	71.75
12	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	Indeks	82	Nilai Posisi Akhir	Semesteran	0	70	70	0	0	82	82
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBAPPP	Nilai	71	Nilai Posisi Akhir	Tahunan	0	0	0	0	0	81	81
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	%	77	Nilai Posisi Akhir	Tahunan	0	0	0	0	0	77	77
15	Proposal Inovasi Pelayanan Publik (Proposal)	%	1	Nilai Posisi Akhir	Tahunan	0	0	0	0	0	1	1

Sumber : Target IKU Des 2025

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan dari Program Riset Sumber Daya Manuasi Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan BRPBAPPP pada Triwulan I Tahun 2026, maka dijabarkan ke dalam 2 kegiatan yang dibagi beberapa output kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

1.1. Pendidikan Kelautan dan Perikanan

 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden

1.2. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

✚ Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat.

✚ Penelitian dan Pengembangan Modeling

2. Program Dukungan Manajemen

- a. Layanan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari: Layanan Umum dan Layanan Perkantoran, Layanan Humas, Layanan BMN.
- b. Layanan Manajemen SDM Internal
- c. Layanan Manajemen Kinerja terdiri dari : Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Penyelenggaraan Kearsipan,

Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum pada Tabel diatas, selanjutnya dituangkan ke dalam rencana aksi/ inisiatif strategis. Rencana Aksi atau Inisiatif Strategis adalah kegiatan yang tertuang di Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) yang merupakan kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama. Masing-masing kegiatan yang terdapat di RKA-KL terkait dengan anggaran tahun berjalan. Penanggung jawab kegiatan di RKA-KL terkait juga dengan penanggung jawab indikator kinerja utama yang di cascading oleh Kepala BRPBAPPP ke Tim Pokja.

Rencana aksi BRPBAPPP disusun pada awal tahun atau setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja. Rencana aksi berisi target output/volume dan progress fisik masing-masing kegiatan yang menjadi pendukung sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama BRPBAPPP selama triwulan I tahun 2026.

G. PENGUKURAN KINERJA

1. Rumusan Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BRPBAPPP triwulan I tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing–masing indikator kinerja sehingga akan diperoleh indeks capaian indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada manual indikator kinerja yang ada pada masing-masing indikator.

Penghitungan indeks capaian indikator kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi indikator kinerja yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian indikator kinerja adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;

3. Formula penghitungan indeks capaian indikator kinerja untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status indeks capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50

2. Metode Pengukuran Kinerja

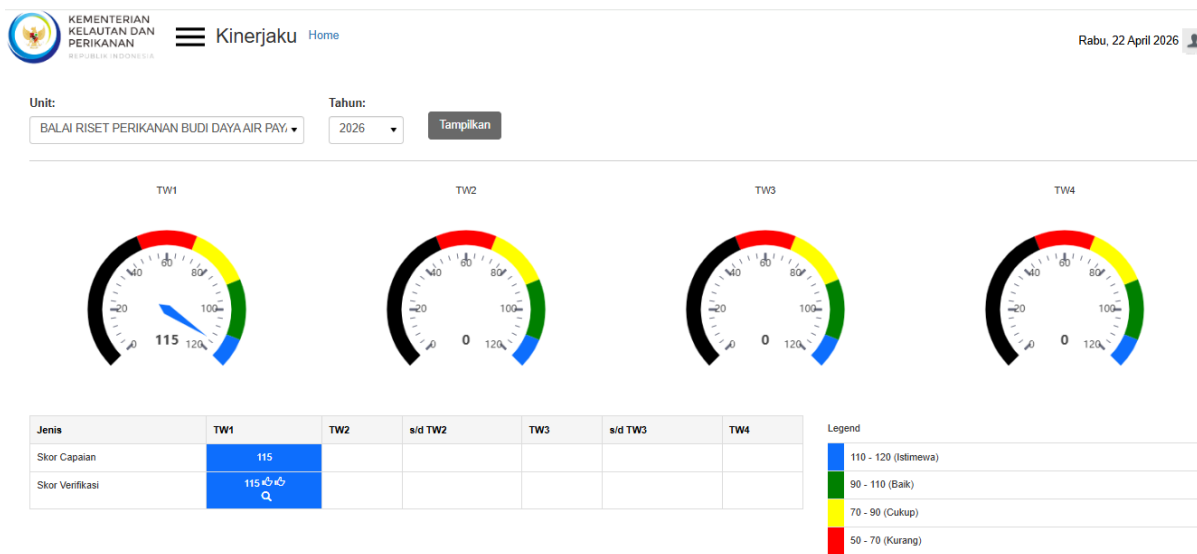
Metode pengukuran kinerja lingkup BRPBAPPP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran dan pelaporan kinerja, telah ditugaskan kepada Sub tim pengukuran, pelaporan kinerja, dan evaluasi berdasarkan SK Tim Pengelola Kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PRESTASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TRIWULAN I TAHUN 2026

Pengukuran capaian kinerja BRPBAPPP triwulan I tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target tahunan, target triwulan tahun berjalan dan target triwulan tahun lalu dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indikator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Logical Framework Analysis* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPSDM di tingkat korporat tahun 2026 sebesar 115%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 3. Capaian Kinerja IKU Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Dashboard Kinerja BRPBAPPP pada www.kinerjaku.kkp.go.id.

Sumber: SAPK KKP, Triwulan I Tahun 2026



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA


Kinerjaku
[Home](#)

Jumat, 17 April 2026

Verifikasi Capaian Unit Kerja

Tahun

Level-1

Level-2

Level-3

Panduan

2026

Belum di pilih...

Belum di pilih

Belum di pilih

TW-1		TW-2		TW-3		TW-4	
Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi
BALAI RISET PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN							
115.00%	115.00%	+		+		+	

Sumber: SAPK KKP Triwulan I Tahun 2026

Gambar 4. Daftar Capaian TW I Tahun 2026 Berdasarkan Dashboard Kinerja BRPBAPPP pada www.kinerjaku.kkp.go.id.

Tabel 20. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2026

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target MARET	Capaian MARET	%	Target s/d MARET	Capaian s/d MARET	%	Tgl Input
S.01	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						120,00			120,00		
IKSK.01.01	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	195,00	5,00	6,00	120,00	5,00	6,00	120,00	4/14/2026 13:53
IKSK.01.02	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5.308,00	500,00	600,00	120,00	500,00	600,00	120,00	4/14/2026 13:53
IKSK.01.03	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	676,00	15,00	19,00	120,00	15,00	19,00	120,00	4/14/2026 13:53
IKSK.01.04	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBAPPP (Unit)	Unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	58,00	20,00	24,00	120,00	20,00	24,00	120,00	4/14/2026 13:53
IKSK.01.05	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBAPPP (Paket)	Paket	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.01.06	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan oleh BRPBAPPP (Model)	Model	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.01.07	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	6,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
S.02	Kelautan dan Perikanan						110,00			110,00		
IKSK.02.01	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	86,00	86,00	100,00	86,00	86,00	100,00	4/14/2026 13:53
IKSK.02.02	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,10	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.02.03	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.02.04	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,75	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.02.05	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.02.06	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.02.07	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,00	77,00	100,00	120,00	77,00	100,00	120,00	4/14/2026 13:53
IKSK.02.08	Proposal Inovasi Pelayanan Publik (Proposal)	Proposal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53

Sumber: SAPK KKP Triwulan I Tahun 2026

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan telah menetapkan 2 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada triwulan I tahun 2026. Ketiga Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 Indikator Kinerja (IK). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh skor kinerja BRPBAPPP pada triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 115%, ada 6 IK yang memiliki capaian rata-rata sebesar 100%, 5 IK yang memiliki capaian lebih dari 100% berwarna biru dan 1 IK

yang memiliki capaian sebesar 100%. Adapun rincian capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis, sesuai dengan nilai NKO :

1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, memiliki 7 Indikator Kinerja Pendukung, yaitu :
 - a. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok) target triwulan I tahun 2026 sebesar 195 dimana target triwulan I tahun 2026 sebesar 5 kelompok, capaian sebesar 6 Kelompok (120%), berstatus Biru.
 - b. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok) target tahun 2026 sebesar 5308 kelompok, dimana target triwulan I tahun 2026 sebesar 500 kelompok, capaiannya sebesar 600 Kelompok (104,17%), berstatus biru.
 - c. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok) target tahun 2026, dimana target triwulan I sebesar sebesar 15 kelompok, capaian sebesar 19 kelompok (120%), berstatus Biru.
 - d. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBAPPP (Unit) target tahun 2026, dimana target triwulan sebesar 20 unit, capaiannya sebesar 24 Unit (120%), berstatus biru.
 - e. Media Penyuluhan Terstandar yang disusun di BRPBAPPP (Paket) target tahun 2026 sebesar 1 Paket. Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.
 - f. Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Model) target tahunannya sebesar 1 Model. Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.
 - g. Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang) target tahun 2026 sebesar 6 orang. Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, memiliki 8 Indikator Kinerja Pendukung, yaitu :

- a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%), target tahun 2026 sebesar 86% dan capaiannya sebesar 86% (100%) berstatus hijau.
- b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai) target tahun 2026 sebesar 92 Nilai Pengukurannya dilakukan persemester sehingga belum ada capaian.
- c. Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai), target tahun 2026 sebesar 81 Nilai dan Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.
- d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai), target tahun 2026 sebesar 71,75 Nilai dan Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.
- e. Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks), target tahun 2026 sebesar 82 Indeks dan Pengukurannya dilakukan persemester sehingga belum ada capaian.
- f. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBAPPP (Nilai), target tahun 2026 sebesar 71 Nilai. Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.
- g. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%), target tahun 2026 sebesar 77% dan capaian sebesar 100% (120%), berstatus biru.
- h. Proposal Inovasi Pelayanan Publik (Proposal), target tahun 2026 sebesar 1 Proposal dan belum ada capaian.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRPBAPPP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BRPBAPPP yang menjadi kontrak kinerja pada tahun 2026 dapat tercapai.

C. CAPAIAN KINERJA BRPBAPPP

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros pada triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai.

Capaian indikator kinerja utama Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros selama triwulan tahun 2026 hanya tersedia internal process mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada *SMART*. Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, sebagian besar telah berhasil tercapai. pencapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja utama tahun 2026 yang mengacu *SMART* dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 21. Capaian IKU Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I Tahun 2026

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target MARET	Capaian MARET	%	Target s/d MARET	Capaian s/d MARET	%	Tgl Input
S.01	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						120,00			120,00		
IKSK.01.01	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	195,00	5,00	6,00	120,00	5,00	6,00	120,00	4/14/2026 13:53
IKSK.01.02	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5.308,00	500,00	600,00	120,00	500,00	600,00	120,00	4/14/2026 13:53
IKSK.01.03	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	676,00	15,00	19,00	120,00	15,00	19,00	120,00	4/14/2026 13:53
IKSK.01.04	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBAPPP (Unit)	Unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	58,00	20,00	24,00	120,00	20,00	24,00	120,00	4/14/2026 13:53
IKSK.01.05	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBAPPP (Paket)	Paket	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.01.06	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan oleh BRPBAPPP (Model)	Model	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.01.07	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	6,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
S.02	Kelautan dan Perikanan						110,00			110,00		
IKSK.02.01	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	86,00	86,00	100,00	86,00	86,00	100,00	4/14/2026 13:53
IKSK.02.02	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,10	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.02.03	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.02.04	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,75	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.02.05	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.02.06	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53
IKSK.02.07	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,00	77,00	100,00	120,00	77,00	100,00	120,00	4/14/2026 13:53
IKSK.02.08	Proposal Inovasi Pelayanan Publik (Proposal)	Proposal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		4/14/2026 13:53

Sumber: SAPK KKP Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategis yang dituangkan

pada penetapan kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros tahun 2026 dapat tercapai. Capaian Kinerja yang tersedia pada aplikasi kinerja hanya pada “Internal process perspective”.

SASARAN KEGIATAN 1. TERSELENGGARANYA PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran kegiatan pertama pada tahun 2026 yakni Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan didukung 7 indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut.

INDIKATOR 1 KELOMPOK PELAKU USAHA DAN/ATAU PELAKU PENDUKUNG YANG DITINGKATKAN KELASNYA OLEH BRPBAPPP (KELOMPOK)

Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang meningkat kelas kemampuannya setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan. Peningkatan kelas kemampuan kelompok mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.

Formula Perhitungan : Menjumlahkan kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama).

Tabel 22. Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)									
Realisasi				Triwulan I TA. 2026				Rancangan IK Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	2029	% Capaian thd target 2029
2	0	3	2	5	6	120	200.00	168	3.57

Sumber: <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan I TA 2026

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian IKU triwulan I tahun 2026 ini memiliki target sebanyak 5 kelompok, capaiannya sebanyak 6 kelompok (120%), sedangkan pada target dan capaian triwulan I tahun 2025 sebesar 2 kelompok (100%) dari targetnya sebesar 297 kelompok sehingga mengalami peningkatan sebesar 4%

Apabila melihat capaian pada triwulan I tahun 2022-2025 diatas, capaian indikator tersebut mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada triwulan I tahun 2022 target sebesar 1 kelompok dan capaian sebesar 2 kelompok (120%). Pada tahun 2023 target dan capaian belum ada. Pada triwulan I tahun 2024 capaiannya sebesar 3 kelompok dari targetnya sebesar 1 kelompok (120%). Pada triwulan I tahun 2025 target dan capaian sebesar 2 kelompok (100%). Pada triwulan I tahun 2026 capaian sebesar 6 kelompok dari target sebesar 5 kelompok sehingga persentase kenaikan 2025-2026 mengalami peningkatan sebesar 4%. Sedangkan rancangan indikator kinerja Tahun 2025-2029 sebesar 168 kelompok sehingga persentase capaian terhadap target 2029 mengalami peningkatan sebesar 3,57%. Hal ini karena karena sebagian besar penyuluh memahami prosedur kenaikan kelas kelompok, dan pembuatan profil kelompok. Dan ada beberapa juga penyuluh yang belum memahami prosedur kenaikan kelas dan masih kurang memahami Masih ada beberapa penyuluh kelompok pelaku utama/pelaku pendukung yang belum sesuai dengan format PermenKP No 319 Tahun 2025. Rekomendasi Indikator Kinerja ini yakni Mengembalikan data dukung yang masih keliru kepada penyuluh untuk memperbaiki yang dilengkapi dengan catatan perbaikan dan tindak lanjutnya yakni Menunggu hasil perbaikan IKU naik kelas dari penyuluh.

Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dilapangan, penyuluh perikanan memiliki kelompok binaan, kelompok binaan penyuluh dapat dilihat dari kelas kelompoknya, kelas kelompok binaan penyuluh seperti non kelas, kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama.

Kelas Pemula adalah kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai terbawah dan terendah pada batas skoring penilaian dari 0 sampai dengan 250 dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerja sama, dan akses informasi pasar, serta diberikan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.

Kelas Lanjut adalah kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai menengah pada batas skoring penilaian dari 251 sampai dengan 500 dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha,

kemampuan permodalan, kemitraan/kerjasama, dan akses informasi pasar, serta sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dan diberikan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Camat.

Kelas Madya adalah kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai menengah pada batas skoring penilaian dari 500 sampai dengan 750 dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerjasama, dan akses informasi pasar, serta sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dan diberikan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan.

Kelas Utama adalah kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai tertinggi pada batas skoring penilaian dari 644 sampai dengan 1.000 dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerjasama, dan akses informasi pasar, serta sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dan diberikan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Penyuluhan Perikanan.

Adapun capaian Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok) yakni :

Tabel 23. Capaian Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)

No	Provinsi	Kelas Kelompok			Total
		Pemula Menjadi Lanjut	Lanjut Menjadi Madya	Madya Menjadi Utama	
1	Sulawesi Selatan	3	2	0	5
3	Sulawesi Tenggara	1	0	0	1
	Jumlah	4	2	0	6

Sumber : Laporan Penyuluhan Triwulan I TA 2026

Peningkatan kelas kelompok berdasarkan Kepmen KP No.28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, meliputi beberapa kriteria penilaian yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Penguasaan teknologi; 2. Pengorganisasian; 3. Skala Usaha; 4. Kemampuan Permodalan; 5. Kemitraan/Kerjasama; dan 6. Akses informasi pasar

Beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh penyuluh perikanan dalam rangka peningkatan kelas kelompok adalah:

- a. Penyuluh perikanan kabupaten/kota menyiapkan instrument, menyusun dan menetapkan jadwal penilaian dan pelaporan hasil secara berjenjang;
- b. Penyuluh perikanan menetapkan metodologi penilaian;
- c. Penyuluh perikanan melakukan sosialisasi instrument, metodologi, jadwal dan pelaksana penilaian kepada Tim Penilaian;
- d. Penyuluh bersama Tim Penilai melakukan verifikasi dan hasil penilaian
- e. penilaian Peningkatan Kelas kelompok;
 - Kelas pemula dengan perolehan nilai ≤ 250 tetap sebagai Kelas Pemula
 - Kelas pemula dengan perolehan nilai $> 251 - 500$ disesuaikan sebagai kelas lanjut
 - Kelas madya dengan perolehan nilai $> 501 - 750$ tetap sebagai kelas madya
 - Kelas Utama dengan perolehan nilai $> 751 - 1000$ tetap sebagai kelas Utama
- f. Penyuluh Perikanan mengusulkan kenaikan kelas kelompok :
 - Kelas Pemula sertifikat pengukuhan oleh Lurah/ Desa setempat
 - Kelas Lanjut sertifikat pengukuhan oleh Camat setempat
 - Kelas lanjut ke Madya sertifikat pengukuhan oleh Dinas KP setempat
 - Kelas Madya ke Utama sertifikat pengukuhan oleh Kapus BPPSDMKP
- g. Penyuluh Perikanan mendampingi proses penerbitan sertifikat pengukuhan;
- h. Sertifikat pengukuhan diserahkan kepada kelompok perikanan.



Sumber : Data dari Data Dukung Penyuluhan triwulan I tahun 2026

Gambar 5. Kegiatan Penilaian Kelas pokdakan Bintang Timur Salekoa Kel Sidenre Kec Binamu.

Capaian IK Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan Kelasnya ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel :

Tabel 24. Perbandingan Capaian IKU Triwulan I Tahun 2026 dengan Satker Lain

No	Satuan Kerja	Triwulan I		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	5	6	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Perikanan	1	1	100

Sumber : Sistem Aplikasi Kinerjaku <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua Satker lingkup BPPSDM memiliki nilai rata-rata 100%. Untuk kedepannya, diharapkan capaiannya dapat lebih ditingkatkan lagi salah satunya melalui pemantauan terhadap kinerja penyuluh perikanan agar tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor keberhasilan IK ini yakni :

- Kedisiplinan Administrasi seperti kemampuan kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung dalam mengelola organisasinya mereka sendiri (menyusun buku tamu, buku Kas dan lainnya)
- Keberhasilan penyuluh dalam memfasilitasi kelompok untuk memiliki NIB
- Adopsi Inovasi dan Teknologi Riset seperti melakukan sosialisasi dengan bekerjasama tenaga peneliti dari BRIN seperti penggunaan probiotik dan CBIB
- Akses permodalan dan kemitraan
- Validasi dan Akurasi Data seperti adanya Aplikasi data IKU Penyuluhan yang dibuat oleh Balai sehingga dari Balai sendiri bisa memantau per IKU dan dari Penyuluh sendiri juga bisa melihat yang mana yang masih kurang datanya.
- Intensitas penyuluh melakukan pendampingan melakukan monitoring

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yakni : Pendampingan dan Penyusunan profil Kelompok Pelaku

Utama/ Pelaku Pendukung dan Verifikasi dan validasi Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP

Anggaran yang mendukung IKK Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok) adalah RO Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 2.158.864.000,- Sudah ada realisasi sebanyak Rp. 269.485.215,- (12,48%) Jika dibandingkan dengan persentase capaian sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,40%.

INDIKATOR KINERJA 2

KELOMPOK PELAKU USAHA DAN/ATAU PELAKU PENDUKUNG YANG DISULUH OLEH BRPBAPPP (KELOMPOK)

Merupakan Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan meliputi: fasilitasi akses informasi, akses teknologi terekomendasi dan/atau tepat guna, akses pasar, akses permodalan, dan akses perizinan berusaha dan/atau manajemen mutu.

Pelaksanaan penyuluhan terhadap pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Setiap kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang telah disuluh wajib dibuatkan profil kelompoknya, mengacu pada Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 319 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.

Formula perhitungan Menjumlahkan kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya. Bukti dukung berupa Data kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh oleh penyuluh perikanan, sebagaimana format tabel pada tautan berikut:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qlBRp1HuSNsk7_lxC5tATHJX6vdNDC_VI/edit?usp=drive_link&oid=108916085440761015580&rtpof=true&sd=true

Tabel 25. Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)									
Realisasi				Triwulan I TA. 2026				Rancangan IK Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	2029	% Capaian thd target 2029
4280	2619	1913	150	500.00	600.00	120.00	300.00	5,005	11.99

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/> triwulan I TA 2026

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa target triwulan I tahun sebanyak 150 kelompok dengan capaian sebanyak 180 kelompok (120%), sedangkan capaian triwulan I tahun 2026 sebanyak 600 kelompok (120%) dari target sebesar 500 kelompok sehingga mengalami kenaikan sebanyak 420 kelompok (120%), hal ini disebabkan a) adanya verifikasi data secara ketat yang dilakukan oleh tim kerja internal di Balai sehingga jika ada data yang keliru langsung dikembalikan ke penyuluhnya untuk memperbaiki b) sering dilakukan sosialisasi tentang PermenKP No 28 Tahun 2024. Sedangkan Rekomendasinya Memberitahukan kepada penyuluh melalui media komunikasi mengenai koreksi dari IK Disuluh.

Apabila melihat capaian pada triwulan I tahun 2022-2026 diatas, capaian indikator tersebut mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada triwulan I tahun 2022 capaiannya sebesar 4280 kelompok dari target 4000 kelompok (107%). Pada triwulan I tahun 2023 capaiannya sebesar 2619 kelompok dari target 1000 kelompok (120%). Pada triwulan I tahun 2024 capaian sebesar 1913 kelompok dari target 1500 kelompok (100,25%), dan pada triwulan I tahun 2025 capaian sebesar 180 kelompok dari target 150 kelompok (120%). Sedangkan rancangan indikator kinerja Tahun 2025-2029 sebanyak 5.005 kelompok sehingga % capaian terhadap target 2029 sebanyak 11,99%.

Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh yang menjadi binaan penyuluh perikanan memiliki usaha sebagai nelayan, pembudidaya, pengolahan dan pemasaran serta usaha garam rakyat. Untuk memudahkan melakukan pembinaan terhadap masyarakat perikanan, kelompok-kelompok binaan penyuluh dibagi menjadi beberapa bidang sesuai dengan bidang usahanya seperti :

1. KUB (Kelompok Usaha Bersama),
2. POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan),
3. POKLAHSAR (Kelompok Pengolahan Dan Pemasaran),
4. KUGAR (Kelompok Usaha Garam Rakyat) dan
5. POSMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas).

Tujuan utama pembagian ini untuk memudahkan penyuluh untuk menyampaikan materi penyuluh kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok) Maros Tahun 2025 Dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Berdasarkan bidang Usaha KP

Tabel 26. Realisasi Capaian Berdasarkan Klasifikasi Kelas Dan Bidang Usaha Yang Disuluh Triwulan I Tahun 2026

NO	BIDANG USAHA	PROVINSI			TOTAL
		Sulawesi Selatan	Sulawesi Barat	Sulawesi Tenggara	
1	Budidaya (POKDAKAN)	227	18	78	323
2	Penangkapan (KUB)	134	21	85	240
3	Pengolahan/Pemasaran (POKLAHSAR)	21	3	7	31
4	Garam (KUGAR)	6	0	0	6
5	POKWISRI	0	0	0	0
6	POKMASWAS	0	0	0	0
7	KOMPAK	0	0	0	0
	TOTAL	367	42	170	600

Sumber : Katimja Penyuluhan

Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok) Maros pada triwulan I Tahun 2026 adalah 6000 Kelompok. Bidang Usaha yang terbanyak dimiliki Kelompok KP di Satminkal BRPBAPPP Maros yakni budidaya/POKDAKAN sebanyak 323 kelompok, Penangkapan (KUB) 240 Kelompok, Pengolahan/Pemasaran 31 Kelompok, Garam/KUGAR 6 kelompok dan kelompok yang lainnya belum ada capaiannya.

Hal ini menunjukkan bahwa Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh yang menjadi binaan penyuluh perikanan mayoritas memiliki usaha sebagai pembudidaya, baik di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat maupun Sulawesi Tenggara. Potensi terbesar kelompok KP yang dimiliki oleh Satminkal BRPBAPPP Maros adalah bidang budidaya. Sedangkan yang masih perlu ditingkatkan lagi potensinya adalah

bidang garam sehingga perlu dikembangkan di daerah Sulawesi Barat dan daerah Sulawesi Tenggara sedangkan bidang POKWISRI Pokmaswas dan KOMPAK masih perlu ditingkatkan bidang usahanya disemua provinsi.

Penyuluhan atau Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan Kegiatan Penyuluhan Perikanan diharapkan mampu menjadi salah satu katalisator dalam upaya mengerakkan sumberdaya manusia yang handal dan profesional sebagai modal dasar bagi pembangunan kelautan dan perikanan.

Tabel 27. Realisasi Capaian Berdasarkan Klasifikasi Kelas Kelompok Yang Disuluh Triwulan I Tahun 2026

NO	KELAS KELOMPOK	PROVINSI			TOTAL
		Sulawesi Selatan	Sulawesi Barat	Sulawesi Tenggara	
1	Pemula	149	26	53	228
2	Lanjut	112	10	37	159
3	Madya	126	6	80	212
4	Utama	1	0	0	1
	TOTAL	388	42	170	600

Sumber : Katimja Penyuluhan

Berdasarkan tabel data di atas menunjukkan bahwa mayoritas kelompok yang disuluh adalah kelas kelompok Pemula, yaitu 228 kelompok yang terbagi menjadi 149 kelompok di Sulawesi Selatan, 53 kelompok di Sulawesi Tenggara dan 26 kelompok di Sulawesi Barat; Kelas kelompok lanjut, yaitu 159 kelompok yang terbagi menjadi 112 kelompok di Sulawesi Selatan, 37 kelompok di Sulawesi Tenggara dan 10 kelompok di Sulawesi Barat; Kelas kelompok madya sebesar 212 kelompok yang disuluh dengan rincian 126 kelompok di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi tenggara sebanyak 80 kelompok dan Sulawesi Barat sebanyak 6 kelompok dan Kelas kelompok Utama sebesar 1 terdapat pada provinsi Sulawesi selatan sebesar 1 kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah kelompok berdasarkan kelas kelompoknya Pertriwulan I Tahun 2026.

Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan memiliki peran yang sangat penting dikarenakan penyuluhan bukan saja berperan dalam kegiatan prakondisi masyarakat

agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kelautan dan perikanan, akan tetapi juga berintegrasi dengan fungsi pendampingan yang secara terus menerus sehingga tumbuh kemandirian dalam usaha kelautan dan perikanan yang akhirnya meningkatkan produktivitas usahanya.

Sasaran Pendampingan oleh Penyuluh Perikanan adalah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan Perikanan (Pokdakan, KUB, Poklahsar, Kugar dan Pokwaswas) dan pelaku utama perikanan perorangan.



Gambar 1. Pendampingan akses informasi tentang program strategis nasional sektor KP tentang pupuk bersubsidi dan sosialisasi permen KP No. 22 tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi bagi pembudidaya ikan, akses teknologi TSFP Udang windu II dan membahas akses bantuan dari BPBAP Takalar, di Desa Gentung, tanggal 03 Februari 2026

Sumber : Kegiatan Penyuluhan

Gambar 6. Pendampingan akses informasi tentang program strategis nasional KP tentang pupuk bersubsidi dan sosialisasi Permen KP No 22 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi bagi pembudidaya ikan, akses teknologi TSFP udang windu II dan membahas akses bantuan dari BPAP Takalar di Desa Gentung tanggal 3 Februari 2026

Capaian IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBAPPP (kelompok) ini jika dibandingkan dengan 4 (empat) Satker lain lingkup BPPSDM KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Perbandingan Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok) dengan UPT Lain.

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	500	600	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	100	120	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	50	50	100
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	100	120	120

Sumber : Sistem Aplikasi Kinerjaku <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua Satker rata-rata capaiannya sebesar 120% dan hanya BRPBATP yang memiliki capaian 100% Untuk kedepannya, diharapkan capaiannya dapat lebih ditingkatkan lagi salah satunya melalui pemantauan terhadap kinerja penyuluh perikanan agar tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yakni :

- Penilaian dan Pengukenan Kelas Kemampuan Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung
- Verifikasi dan validasi Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok).

Keberhasilan Indikator Kinerja ini bisa tercapai karena Pembinaan Katimja Penyuluhan ke Penyuluh yang bersangkutan dengan melakukan pertemuan secara zoom meeting yang kurang capaiannya dan Tim Monev Balai mengingatkan dan membantu dalam hal verifikasi capaian IK ini.

Faktor pendukung IKU ini adalah :

1. Penyuluhan terhadap kelompok merupakan salah satu tugas pokok penyuluh perikanan yang akan dituangkan di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Penyuluh Perikanan sehingga setiap Penyuluh harus mencapai targetnya.
2. Sosialisasi ke penyuluh supaya lebih paham tentang semua IK Penyuluhan
3. Hasil verifikasi yang salah akan diberikan catatan sedetail mungkin agar bisa diperbaiki sesuai catatan

4. Melakukan pendekatan coaching baik per Kabupaten maupun perorangan

Anggaran yang mendukung IKK Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok) adalah RO Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 2.158.864.000,- Sudah ada realisasi sebanyak Rp. 269.485.215 (12,48%) Jika dibandingkan dengan persentase capaian sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,40%.

INDIKATOR KINERJA 3**KELOMPOK PELAKU USAHA DAN/ATAU PELAKU PENDUKUNG YANG DIBENTUK OLEH BRPBAPPP (KELOMPOK)**

Merupakan Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan yang dibuktikan Surat Pengesahan Pembentukan Kelompok. Pembentukan kelompok mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, serta Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 319 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.

Formula Perhitungan : Menjumlahkan kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang dibentuk. Data pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang dibentuk, sebagaimana format tabel pada tautan berikut:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ldYL5r3O8xKmoPejWne0dR1XluEMROcY/edit?usp=drive_link&oid=108916085440761015580&rtpof=true&sd=true

Tabel 29. Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)									
Realisasi				Triwulan I TA. 2026				Rancangan IK Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	2029	% Capaian thd target 2029
147	15	144	6	15.00	19.00	120	216.67	510	3.73

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan I TA.2026

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa target triwulan I tahun 2026 sebesar 15 kelompok dari capaian sebanyak 19 kelompok (120%), sedangkan capaian triwulan I tahun 2024 sebanyak 144 kelompok (120%) dari target sebesar 100 kelompok sehingga presentase kenaikan 2024-2025 mengalami peningkatan sebesar 216,67%, hal ini disebabkan karena bagian tim penyuluhan sll berkoordinasi melalui media komunikasi berupa zoom meeting dalam proses pembentukan kelompok. Namun ada beberapa permasalahan dalam IK ini yakni masih ada beberapa kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yang tidak sesuai format PermenKP dalam hal profil pembentukan kelompok.

Apabila melihat capaian pada triwulan I tahun 2021-2024 diatas, capaian indikator tersebut mengalami perubahan dari tahun ke tahun Pada triwulan I tahun 2021 capaiannya sejumlah 550 kelompok dari target 300 kelompok (120%). Pada triwulan I tahun 2022 capaiannya sebesar 480 kelompok dari target 322 kelompok (120%), pada triwulan I tahun 2023 capaiannya sejumlah 361 kelompok dari target 355 kelompok dan pada triwulan I tahun 2024 capaian sebesar 527 kelompok (120%) dari target sebesar 481 kelompok. Sedangkan rancangan indikator kinerja Tahun 2025-2029 sebesar 510 kelompok sehingga jika dibandingkan persentase capaian terhadap target 2029 mengalami peningkatan sebesar 3,73%.

Membentuk kelompok adalah langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok dan pengembangan usaha berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti dalam membentuk kelompok usaha Kelautan dan Perikanan (KP).

Identifikasi tujuan: Tentukan tujuan utama dari pembentukan kelompok KP. Misalnya, meningkatkan produksi perikanan, memperoleh akses ke pasar yang lebih baik, berbagi pengetahuan dan pengalaman, atau mendapatkan akses ke sumber daya dan layanan kelautan dan perikanan.

Identifikasi anggota potensial: Identifikasi pelaku usaha atau individu lain di wilayah yang memiliki minat dan kepentingan yang sama dalam usaha KP. Kontaklah mereka dan ajak mereka untuk menjadi bagian dari kelompok usaha KP.

Pertemuan awal: Atur pertemuan awal dengan anggota potensial untuk memperkenalkan gagasan dan tujuan pembentukan kelompok KP. Diskusikan manfaat yang mungkin diperoleh melalui kerja sama dan identifikasi isu atau tantangan yang dihadapi oleh para usaha sektor KP di wilayah tersebut.

Pembentukan struktur organisasi: Tentukan struktur organisasi kelompok, seperti kepengurusan, peraturan, dan tugas-tugas yang akan dijalankan. Misalnya, angkat seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota komite lainnya. Buat peraturan tentang keanggotaan, keputusan bersama, dan tanggung jawab anggota.

Pembagian tugas: Bagi tugas dan tanggung jawab di antara anggota kelompok KP. Misalnya, satu anggota dapat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, sementara yang lain dapat mengurus hubungan dengan pemasok atau pembeli. Pastikan semua anggota memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam kelompok KP.

Pelatihan dan pendidikan: Selenggarakan pelatihan dan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok. Ini dapat meliputi pelatihan tentang praktik usaha KP terbaik, manajemen keuangan, pemasaran, atau teknologi kelautan dan perikanan yang inovatif. Kerjasama dengan lembaga kelautan dan perikanan lokal atau organisasi non-pemerintah dapat membantu menyediakan sumber daya dan pendidikan yang diperlukan.

Rencana kegiatan: Bersama-sama, buat rencana kegiatan kelompok usaha KP. Tentukan jenis hewan yang akan dibudidayakan, jadwal pelaksanaan, metode pengelolaan, dan rencana pemasaran. Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta strategi untuk mencapainya.

Kolaborasi dengan pihak terkait: Jalin kemitraan dengan pihak terkait seperti dinas perikanan, lembaga riset, atau lembaga keuangan. Hal ini dapat membantu mendapatkan akses ke sumber daya, teknologi, pembiayaan, dan pasar yang lebih luas.

Meningkatnya capaian indikator kinerja ini pada triwulan IV tahun 2025 karena IKU ini dijadikan sebagai data dukung pada SKP setiap individu penyuluh. Capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk ini berdasarkan keragaan bidang usahanya sebanyak 10 kelompok terdiri dari : (1) kelompok budidaya sebanyak 84 kelompok, (2) kelompok penangkapan sebanyak 68 kelompok, (3) kelompok pengolahan/pemasaran sebanyak 22 kelompok, (4) kelompok garam 1 sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 175 kelompok.

Tabel 30. Kelompok yang dibentuk berdasarkan bidang usahanya yakni :

Provinsi	Budidaya	Penangkapan	Pengolahan/Pemasaran	Pengawasan/Konservasi	Garam	Jumlah
Sulawesi Barat	1					1
Sulawesi Selatan	8	4	1	1		14
Sulawesi Tenggara	2	2				4
Jumlah	11	6	1	1	0	19

Sumber data : Bagian Penyuluhan

Penumbuhan Kelompok pelaku utama sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu tugas Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan. Adapun 2 tujuan dari kegiatan Penumbuhan Kelompok adalah sebagai berikut :

- Sebagai indikator kinerja bagi Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan pendampingan kelompok perikanan; dan
- Sebagai acuan dalam rangka pembinaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Dalam melakukan kegiatan penumbuhan kelompok, penyuluh perikanan melakukan identifikasi pelaku utama yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha sektor kelautan dan perikanan.
- 2) Memiliki usaha sektor kelautan dan perikanan.
- 3) Memiliki kesamaan dalam tradisi kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status ekonomi, atau bahasa.
- 4) Mandiri dan partisipatif
- 5) Merupakan binaan dari penyuluh perikanan



Sumber : Kegiatan Penyuluhan

Gambar 7. Pembentukan Pokdakan Chanos Chanos Balangkassa Dusun Balangkassa Desa Majannang Kec Maros Baru Kab Maros

Kegiatan ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BPPSDM KP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP melalui penumbuhan dengan memenuhi kriteria pembentukan kelompok pelaku utama dengan didampingi penyuluh perikanan.

Penumbuhan Kelompok pelaku utama sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu tugas Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan pendampingan. Tujuan dari kegiatan Penumbuhan Kelompok adalah sebagai berikut:

1. Sebagai indikator kinerja bagi Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan pendampingan kelompok perikanan; dan
2. Sebagai acuan dalam rangka pembinaan kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

Dalam melakukan kegiatan penumbuhan kelompok, Penyuluh perikanan melakukan identifikasi Pelaku Utama yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha sektor kelautan dan perikanan.
- b. Memiliki usaha sektor kelautan dan perikanan.
- c. Memiliki kesamaan dalam tradisi kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status ekonomi, atau bahasa.
- d. Mandiri dan partisipatif.
- e. Merupakan binaan dari penyuluh perikanan

Penumbuhan kelompok pelaku utama dilaksanakan melalui tahapan:

1. Tahap Identifikasi Potensi Wilayah

Identifikasi potensi wilayah dilakukan oleh tokoh masyarakat yang didampingi penyuluh perikanan dengan dasar:

- a. potensi perikanan di wilayah setempat dengan melakukan kegiatan yang untuk mengetahui topografi dan informasi mengenai gambaran umum kondisi desa (kehidupan, kebiasaan, kecenderungan, kebutuhan aspirasi, potensi dan masalah yang ada dimasyarakat) yang dilakukan secara partisipatif. Tujuan dari identifikasi wilayah ini adalah untuk mengetahui permasalahan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh wilayah setempat sehingga akan diperoleh data dan informasi yang memberikan gambaran akurat mengenai potensi perikanan wilayah tersebut;
- b. keadaan ekonomi budaya masyarakat setempat dilakukan untuk mengukur kondisi sosial budaya dan ekonomi baik dalam hal kelembagaan, aturan, persepsi, partisipasi, sumber penghidupan masyarakat baik pendapatan dan pengeluaran masyarakat setempat;
- c. dinamika masyarakat perikanan setempat dapat terjadi interaksi sosial, kelompok sosial dan kelas sosial sebagai berikut :
 - Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat.
 - kelompok sosial adalah masyarakat yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota

masyarakat perikanan. Kelompok juga dapat memengaruhi perilaku para anggotanya.

- Kelas sosial atau golongan sosial merujuk kepada perbedaan hierarkis (atau stratifikasi) antara individu atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya.

2. Tahap Pelaksanaan Penumbuhan

Penyuluh Perikanan melakukan pendampingan kepada pelaku utama dalam membentuk kelompok dengan cara:

- a. Melakukan sosialisasi penumbuhan kelompok kepada pemerintah setempat, tokoh masyarakat, pelaku utama, pelaku usaha kelautan dan perikanan tentang hasil identifikasi potensi wilayah.
- b. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan tatap muka dengan pelaku utama dengan melampirkan daftar hadir dan notulen hasil sosialisasi.
- c. Melakukan pertemuan lanjutan dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, pelaku utama, pelaku usaha perikanan untuk membentuk kelompok, menyusun struktur organisasi, memilih pengurus kelompok, menyusun anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, dan membuat Berita Acara pengukuhan kelompok.
- d. Kelompok yang sudah terbentuk dilakukan pengukuhan dengan menerbitkan sertifikat pengukuhan yang ditandatangani oleh pejabat wilayah setempat (lurah, kepala desa atau sejenisnya) dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten/kota.

Faktor keberhasilan Indikator Kinerja ini yakni :

- Validitas Data Anggota dan Legalitas wilayah
- Inventarisasi potensi dan NIK Valid dengan cara memastikan NIK yang valid dan terdaftar di KUSUKA. Kadang ada beberapa kelompok gagal dibentuk disistem data anggotanya merah/ganda
- Dukungan pemerintah Desa mengenai SK dengan memudahkan dalam mendapatkan SK Pengukuhan dari Kepala Desa/Lurah, Oleh karena itu Penyuluh harus memiliki hubungan baik dengan aparat desa setempat.
- Homogenitas Usaha dengan memastikan anggota kelompok memiliki jenis usaha yang sejenis/berkaitan misalnya sama-sama pembudidaya lele agar kelompok solid dan tidak bubar ditengah jalan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yakni :

- Pembentukan Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung
- Verifikasi dan Validasi kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang dibentuk oleh BRPBAPPP

Capaian IK ini jika dibandingkan dengan Satker lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31. Perbandingan Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok) triwulan IV tahun 2025 dengan Satker Lain.

No	Satuan Kerja	Capaian		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	15	19	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	5	7	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	5	5	100
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	10	12	120

Sumber : Sistem Aplikasi Kinerjaku <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hanya satker BRPBATPP yang memiliki capaian sebesar 100%. Untuk kedepannya, diharapkan capaiannya dapat lebih ditingkatkan lagi salah satunya melalui pemantauan terhadap kinerja penyuluh perikanan agar tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Anggaran yang mendukung IKK Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok) adalah RO Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 2.158.864.000,- Sudah ada realisasi sebanyak Rp. 269.485.215,- (100%)- Jika dibandingkan dengan persentase capaian NPSS ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 10.40%

INDIKATOR KINERJA 4**GABUNGAN KELOMPOK DAN/ATAU KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN DARI PENYULUH KP DI BRPBAPPP (UNIT)**

Merupakan Jumlah Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang didampingi oleh Penyuluh Perikanan dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, serta Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 319 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang dibuktikan dengan Surat Pengesahan Gapokkan/ Akta Kopdeskel Merah Putih. Formula Perhitungan menjumlahkan Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang didampingi oleh Penyuluh Perikanan. Bukti dukung Data Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang didampingi oleh Penyuluh Perikanan, sebagaimana format tabel pada tautan berikut:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q6uCVUeAP1VgllARhbout2gn17LCdjse/edit?usp=drive_link&ouid=108916085440761015580&rtpof=true&sd=true

Tabel 32. Capaian IK Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBAPPP (Unit)

Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBAPPP (Unit)									
Realisasi				Triwulan I TA. 2026				Rancangan IK Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	2	20.00	24.00	120.00	1100.00	43.00	55.81

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa capaian triwulan I tahun 2026 sebesar 24 Unit dari targetnya sebesar 20 Unit (120%). Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dari tahun sebelumnya dan tahun 2024-2025 persentase kenaikannya 0% dan jika dibandingkan dengan persentase capaian terhadap target 2029 sebesar 55,81% dari target tahunan 2029 sebesar 43%.



Kamis, 05 Februari 2026 Rapat Anggota Tahunan Koperasi Produsen Teripang Tanadoang yang bertempat di Café Sileya Benteng Selayar.



Kamis, 05 Februari 2026 Pemberian Penghargaan Kepada Koperasi Produsen Budidaya Teripang Tanadoang atas pelaksanaan RAT tepat Waktu dari Pemda Kepulauan Selayar

Sumber : Katimja Penyuluhan

Gambar 8. Kegiatan Pembentukan Koperasi Merah Putih Nelayan

Ada beberapa faktor hambatan pada IK ini masih ada beberapa kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yg tidak sesuai format Permen KP dalam hal profil pendampingan dan penyusunan profil gabungan kelompok/koperasi. Walaupun ada sedikit faktor hambatan akan tetapi target IK ini mencapai target tahunan. Rekomendasi IK ini mengembalikan profil yang masih keliru kepada penyuluh untuk memperbaiki yang dilengkapi dengan catatan perbaikan dan tindak lanjutnya menunggu hasil perbaikan profil dari penyuluh. Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja :

- Pendampingan dan Penyusunan profil Gabungan Kelompok/Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP
- Verifikasi dan validasi Gabungan Kelompok dan/atau koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP di BRPBAPPP (Unit)

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan capaian indikator kinerja ini untuk kedepannya, maka perlu dilakukan perbandingan persentase capaian pada indikator tersebut dengan satker yang lain. Satker yang akan dilakukan perbandingan adalah satker eks riset yang dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP. Berikut perbandingan capaian untuk indikator kinerja ini. Capaian IK ini jika dibandingkan dengan Satker lingkup Pusat Penyuluhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33. Perbandingan Capaian IK ini dengan Satker Lain Lingkup Pusluh

No	Satuan Kerja	Capaian		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	20	24	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	5	6	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100

Sumber : Sistem Aplikasi Kinerjaku <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rhanya satker BBRBLPP yang memiliki capaian sebesar 100%. Untuk kedepannya, diharapkan capaiannya dapat lebih ditingkatkan lagi salah satunya melalui pemantauan terhadap kinerja penyuluh perikanan agar tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Anggaran yang mendukung IKK Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBAPPP (Unit) adalah RO Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 2.158.864.000,- Sudah ada realisasi sebanyak Rp. 269.485.215 (12.48%)- Jika dibandingkan dengan persentase capaian NPSS ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 10.40%

INDIKATOR KINERJA 5**MEDIA PENYULUHAN TERSTANDAR YANG DISUSUN DI BRPBAPPP (PAKET)**

Merupakan Media Penyuluhan adalah adalah Media Penyuluhan adalah adalah segala jenis alat bantu, sarana, atau perantara yang digunakan oleh penyuluh untuk menyampaikan pesan, informasi, atau teknologi kepada masyarakat KP secara lebih efektif, jelas, dan menarik. Media Penyuluhan terdiri dari materi 1. pengembangan sumber daya manusia; 2. peningkatan modal sosial budaya; 3. ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. informasi; 5. ekonomi; 6. manajemen; 7. hukum; dan/atau 8. pelestarian lingkungan. Media Penyuluhan dapat berupa media terdengar, media cetak, media tertayang dan/atau media sosial.

Satu paket media penyuluhan minimal tersusun dari dua materi wajib (teknologi dan pelestarian lingkungan), dan diperbolehkan jika memuat materi selain dua materi tersebut.

Sumber materi penyuluhan terstandar yang akan disusun menjadi media penyuluhan dapat diakses pada laman *Knowledge Management System* (KMS) Materi Penyuluhan KP (<https://sites.google.com/view/pelaksanaan-penyuluhan-kp/beranda>) dan sumber data/informasi lain yang valid dari unit kerja lingkup KKP dan/atau dari Kementerian/Lembaga lainnya.

Penyusunan Media Penyuluhan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Kepala BRSDM KP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Pemanfaatan Materi dan Media Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Daring. Formula Perhitungan menjumlahkan media penyuluhan yang disusun oleh UPT/Satminkal Penyuluhan KP. Bukti dukung softcopy media penyuluhan dan/atau link youtube

Tabel 34. Capaian IK Media Penyuluhan Tersandar yang Disusun di BRPBAPPP (Paket)

Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBAPPP (Paket)									
Realisasi				Triwulan I TA. 2026				Rancangan IK Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa capaian untuk triwulan belum ada karena pengukuran kinerja dilakukan pada akhir tahun/ triwulan IV tahun 2026. Sehingga belum kelihatan persentase kenaikan 2025-2026 dan rancangan IK tahun 2025-2029. Serta belum bisa dibandingkan dengan capaian Satker lainnya.

Anggaran yang mendukung IKK Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket) adalah RO Percontohan Penyuluhan/Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang diterapkan kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 121.079.000,- belum ada realisasi dan capaian.

INDIKATOR KINERJA 6

PERCONTOHAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DITERAPKAN OLEH BRPBAPPP (MODEL)

Merupakan Jumlah kegiatan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan melalui penerapan teknologi terekomendasi dan/atau teknologi tepat guna, termasuk penerapan metode dan praktik usaha yang telah terbukti keberhasilannya yang diharapkan dapat diadopsi dan diterapkan oleh pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Pelaksanaan kegiatan Percontohan Penyuluhan mengacu pada Petunjuk Teknis Percontohan Penyuluhan yang berlaku. Formula Perhitungan menjumlahkan kegiatan percontohan penyuluhan yang telah diterapkan kepada pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Bukti dukung laporan pelaksanaan kegiatan Percontohan Penyuluhan

Tabel 35. Capaian IK Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Model)

Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan oleh BRPBAPPP (Model)									
Realisasi				Triwulan I TA. 2026				Rancangan IK Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	0	0	0	0	0	3	0

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa target dan capaian triwulan I tahun 2026 belum ada sehingga persentase kenaikan 2025-2026 dan persentase capaian terhadap target 2029 belum ada. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2024-2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dari tahun sebelumnya (2022-2024). Serta belum bisa dibandingkan jug capaian IK dengan Satker lain lingkup Pusluh.

Program/ Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja : Penyusunan Laporan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP.

Anggaran yang mendukung IKK Capaian IK Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Model) adalah RO Percontohan Penyuluhan/Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang diterapkan kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 121.079.000,- belum ada realisasi dan capaian.

INDIKATOR KINERJA 7

PENYULUH PERIKANAN YANG LULUS PENILAIAN KOMPETENSI DI BRPBAPPP (ORANG)

Merupakan Jumlah Penyuluh Perikanan dan/atau Asisten Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti dan lulus uji kompetensi, serta memperoleh sertifikat kelulusan dari Biro SDMAO KKP. Formula perhitungannya menjumlahkan Penyuluh Perikanan dan/atau Asisten Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, serta memperoleh sertifikat kelulusan dari Biro SDMAO KKP. Bukti dukung Surat usulan pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi dari Kepala UPT/Satminkal Penyuluhan KP kepada Pejabat Berwenang, dilampiri data Penyuluh Perikanan yang lulus Uji Kompetensi dilengkapi dengan link Sertifikat dan/atau Surat Keterangan dari Biro SDMAO KKP, sebagaimana format tabel pada tautan berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OfXxM2vvy5GNBF8pFkr9Kx084t_WJjB/edit?usp=drive_link&oid=108916085440761015580&rtpof=true&sd=true

Tabel 36. Capaian IK Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)

Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)									
Realisasi				Triwulan I TA. 2026				Rancangan IK Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	0	0	0	0	0	20.00	0.00

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa target dan capaian belum ada pada triwulan I tahun 2026 karena pengukuran kinerja dilakukan akhir tahun 2026. Persentase capaian tahun 2025-2026 dan persentase terhadap target 2029 belum ada, sehingga tidak dibisa dibandingkan juga dengan satker lain lingkup Pusluh.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah RO Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden dengan anggaran sebesar Rp. 1.521.059.000,- belum ada realisasi Anggaran.

SASARAN KEGIATAN 2

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran kegiatan keempat pada triwulan I tahun 2026 yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan didukung 8 indikator kinerja (IK) yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut.

INDIKATOR KINERJA 8

PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA BRPBAPPP (%)

Definisi dari indikator kinerja ini adalah Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah "TUNTAS") oleh seluruh unit kerja lingkup BRPBAPPP sampai dengan waktu pengukuran. Formula perhitungan adalah

$$C = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah rekomendasi Itien yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Pusat Penyuluhan KP

B = Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Pusat Penyuluhan KP

C = Persentase kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor KP yang ditingkatkan kelasnya

Bukti dukung : Surat penyampaian hasil Rekomendasi Pengawasan dari Sekretariat BPPSDM KP. ini dapat dilihat pada tabel berikut :

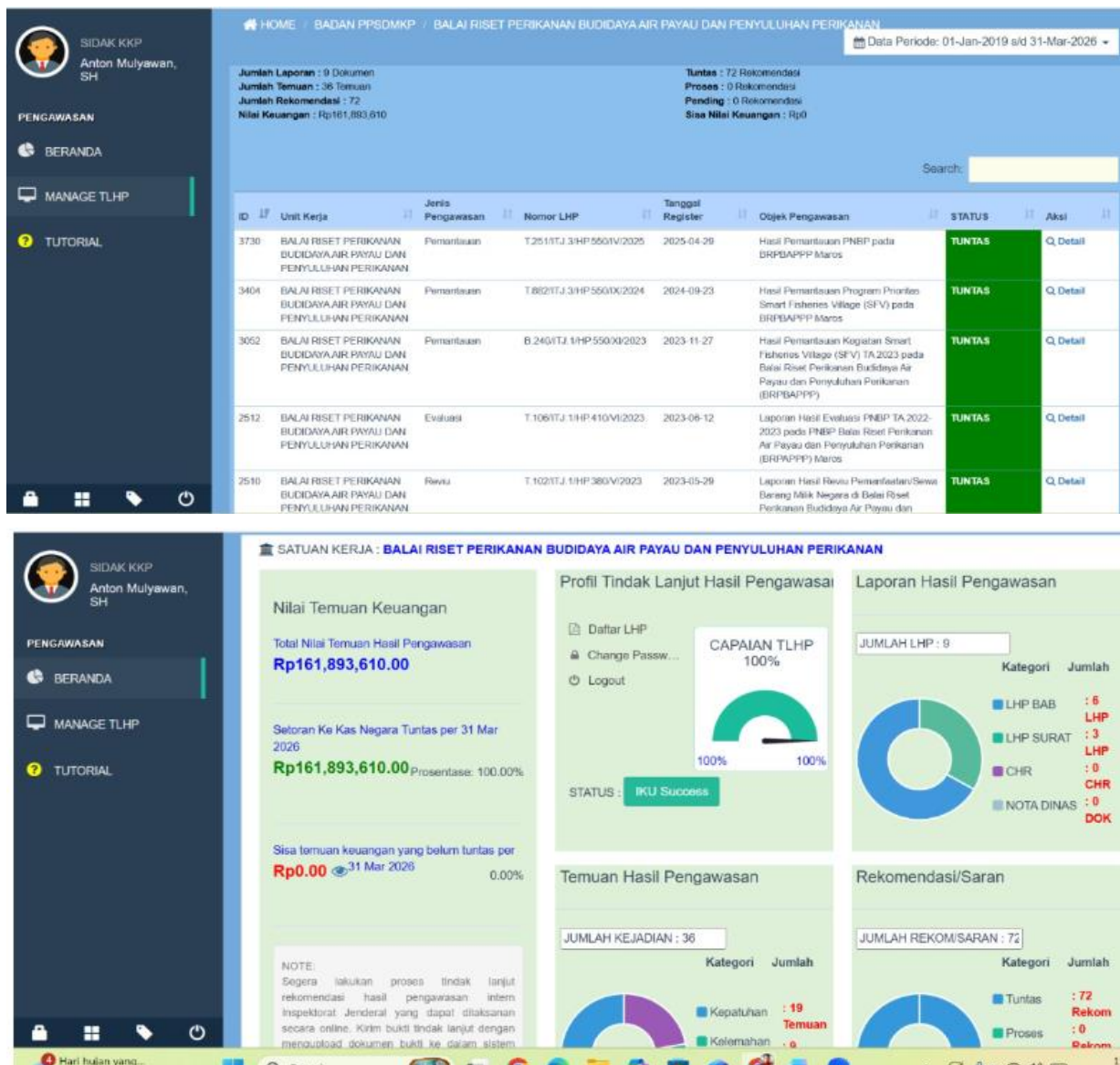
Tabel 37. capaian Indikator Kinerja Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)									
Realisasi				Triwulan I TA. 2026				Rancangan IK Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	2029	% Capaian thd target 2029
-	75	100	85	86.00	86.00	100.00	1.18	85.00	101.18

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan IV TA. 2025

Pada triwulan I tahun 2025 ini, target dan capaian IK ini sebesar 86% (100%). Apabila melihat capaian pada tahun 2022-2025 diatas, capaian indikator tersebut baru muncul di tahun 2023, dimana target dan capaian sebesar 75% (100%). Pada triwulan I tahun 2025 targe dan capaian sebesar 85% (100%). Sehingga jika dibandingkan dengan persentase kenaikan 2025-2026 sebesar 1,18%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian terhadap target 2029 sebesar 101,18% dari target tahun 2029 sebesar 85%.

Capaian Indikator Kinerja tersebut disampaikan oleh BPPSDM KP KP dengan Nomor 1126/BPPSDM.1/HP 510/V/2026 tanggal 14 April 2026 perihal “Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2025 Lingkup BPPSDM KP”. Berdasarkan surat tersebut, BRPBAPPP telah mencapai indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBAPPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan pada tahun 2025 sebesar 86% (100%). Tindak lanjut temuan LHP surat telah dituntaskan 100% pada tahun 2025, dan temuan LHP telah dilaksanakan dan dimasukkan data dukungnya ke aplikasi sidak yang akan menjadi capaian triwulan I tahun 2026.



Sumber : Aplikasi SIDA KKP.go.id

Gambar 9. Screenshoot aplikasi SIDA KKP satker BRPBAPPP Maros

Faktor keberhasilan IK karena tidak terdapatnya temuan. Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP mencapai target pada Triwulan I tahun 2026 ini antara lain:

- Keaktifan Koordinasi dengan Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat BPPSDMKP terkait aplikasi SIDA KKP yang memuat progress tindak lanjut rekomendasi dari Itjen KKP;

Program/ Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja yakni :

- Pemantauan pada Aplikasi SIDAK
- Penyusunan Laporan SPIP Bulanan/Triwulan.
- Pemantauan Pengendalian MR

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP untuk kedepannya, maka perlu dilakukan perbandingan persentase capaian pada indikator tersebut dengan satker yang lain. Satker yang akan dilakukan perbandingan adalah satker yang dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP. Berikut perbandingan capaian untuk indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP. Capaian IKU ini jika dibandingkan dengan Satker lingkup Pusat Penyuluhan KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 38. Perbandingan Capaian IK ini dengan Satker Lingkup Pusluh KP.

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	86	86	100
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	86	86	100
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	86	86	100
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	86	100	116,78

Sumber : Sistem Aplikasi Kinerjaku <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Kalau dibandingkan dengan Satker lain maka hanya Satker BBRBLPP yang capaiannya sebesar 116,78%. Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini untuk semua Satker perlu dipertahankan capaiannya untuk tahun selanjutnya.

Anggaran yang mendukung IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%) adalah RO Layanan Layanan Umum dengan anggaran Rp. 8.400.000,- belum ada realisasi.

INDIKATOR KINERJA 9**INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BRPBAPPP (NILAI)**

Definisi dari indikator kinerja ini Adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Formula Perhitungan: Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Bukti akhir capaian indikator kinerja ini Surat/Nota Dinas Biro Keuangan. Capaian Indikator Kinerja (IK) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPP Triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja IK ini Pada Triwulan I tahun 2026

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)									
Realisasi				TRIWULAN I TA. 2026				Rancangan IK Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	0	0	0	0	0	92	0

Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan I tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa triwulan I tahun 2026 belum ada capaian dan capaian IK ini tidak bisa dibandingkan dengan Satker lain karena

pengukurannya dilakukan persemester tahun 2026. Sedangkan target 2029 sebesar 92% sehingga % capaian terhadap target 2029 belum ada. Dan Adapun progress Maret 2026 yakni :

Tabel 40. Progress Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai) sampai dengan Maret 2026

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER																					
NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran			Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek					
1	03 Maret	136	032	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	0,00 25 0,00	0,00	75,00	100,00%	0,00	75,00	

Sumber : Aplikasi Ompan Bulan Maret 2026

Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja :

- Penginputan indikator penilaian IKPA di Aplikasi OMSPAN
- Pengelolaan UP/TUP dan Penyelesaian tagihan
- Penyusunan Laporan Keuangan
- Penyusunan Laporan PPIK

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai) adalah RO Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan anggaran) Rp. 110.674.640.000,- dan realisasi sebesar Rp 26.886.878.769,- (24,29%).

INDIKATOR KINERJA 10

PENILAIAN MANDIRI SAKIP BRPBAPPP (NILAI)

Definisi dari indikator kinerja ini adalah Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Formula Perhitungan adalah Nilai PM SAKIP BPPSDMKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BPPSDMKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPPSDMKP di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra BPPSDMKP, dan data capaian dirilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Bukti dukung berupa Surat/Nota Dinas Biro Keuangan.

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Sumber : Manual IKU BRPBAPPP 2026

Capaian Indikator Kinerja (IK) Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP Triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 41. Capaian Indikator Kinerja (IK) Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP Triwulan I tahun 2026

Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)									
Realisasi				TRIWULAN I TA. 2026				Rancangan IK Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	0	0	0	0	0	81.00	00

Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, Triwulan I tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada triwulan I tahun 2026 capaiannya belum ada karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun 2026 sehingga belum ada persentase kenaikan 2025-2026 dn belum terlihat juga persentase capaian terhadap target 2029 dan belum bisa juga dibandingkan capaiannya kepada Satker lain lingkup Pusluh.

Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja yakni :

- Penyusunan Dokumen kinerja
- Pengukuran capaian kinerja
- Penyusunan laporan kinerja
- Penilaian Mandiri SAKIP
- Penyusunan laporan Penilaian Mandiri SAKIP

Anggaran yang mendukung IKK Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai) adalah RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan anggaran Rp. 4.000.000,- Belum ada realisasi sehingga belum bisa dilihat NPSS nya.

INDIKATOR KINERJA 11**NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN BRPBAPPP (NILAI)**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Bukti Dukung : Nota Dinas Sekretariat Jenderal. Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKPA Satker = Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker

CRO = Capaian RO

WCRO = Bobot Capaian RO

PenggunaanSBK = Penggunaan SBK

WPenggunaanSBK = Bobot Penggunaan SBK

NEAlokasi = Nilai Efektivitas Alokasi

WEAlokasi = Bobot Efisiensi Alokasi

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

Tabel 42. Capaian Indikator Kinerja NKPA Triwulan I TA 2026

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)									
Realisasi				Triwulan I TA. 2026				Rancangan IK Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	0	0	00		0	71.50	0

Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, Triwulan I tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada triwulan I tahun 2026 belum ada capaian karena pengukurannya dilakukan pada triwulan I TA 2026. IK ini juga tidak bisa dibandingkan dengan 2024 karena IK ini baru ada pada tahun 2021-2024. Sehingga persentase kenaikan 2025-2029 dan persentase capaian terhadap target 2029 belum bisa dibandingkan juga, begitupun dengan perbandingan capaian dengan Sakter lain belum bisa dilakukan hal ini karena pengukurannya dilakukan pada triwulan IV/ akhir tahun 2026.

Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja :

- Penyusunan laporan dari Aplikasi Monev Kemenkeu
- Laporan Capaian Output

Anggaran yang mendukung IKK Layanan Manajemen Keuangan (Pelayanan Keuangan Penyuluhan KP) dengan anggaran Rp. 7.600.000,- realisasi sebesar 210.000,- dan NPSS dan NKO belum ada.

INDIKATOR KINERJA 12

INDEKS PROFESIONALITAS ASN BRPBAPPP (INDEKS)

Definisi dari indikator kinerja ini meliputi :

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan

mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IPASN.

Formula Perhitungan: Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. Calon PNS (CPNS);
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK); dan
- d. Tugas Belajar Dibiayai.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan empat dimensi, meliputi: a) Kualifikasi, b) Kompetensi, c) Kinerja, dan d) Disiplin. Sumber data pengukuran IPASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi:

- a. Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemutakhiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN.
- b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemutakhiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
- c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
- d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Kualifikasi diukur dari indikator Riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- a. Pendidikan S3
- b. Pendidikan S2
- c. Pendidikan S1
- d. Pendidikan D3/Sarjana Muda
- e. Pendidikan D2/D1/SLTA Sederajat
- f. Pendidikan di bawah SLTA

dengan formula sebagai berikut

Nilai	Nama Kualifikasi	Nama Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SLTA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi;
- b. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi;
- d. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- e. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

JABATAN	JENIS JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PEGAWAI (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	S.1/D-IV	25	25	20	10	10	10
Manajerial	Jabatan Administrator	S.1/D-IV	25	25	20	10	10	10
Manajerial	Jabatan Pengawas	D-III	25	25	25	20	10	10
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	SLTA	25	25	25	25	20	10
	(Kategori Keterampilan)	D-III	25	25	25	20	10	10
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	S.1/D-IV	25	25	20	10	10	10
	(Kategori Keahlian)	S.2	25	20	10	10	10	10
Non Manajerial	Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari :

- a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

JABATAN	JENIS JABATAN	INSTRUMEN														
		BOBOT DASAR HASIL PENILAIAN KINERJA					DIKLAT KEPEMIMPINAN		DIKLAT FUNGSIONAL		DIKLAT TEKNIK		PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI PPPK	
		SANGAT BAIK	BAIK	BUTUH PERBAIKAN	KURANG/ MISCONDUCT	SANGAT KURANG	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	>= 20 JP	< 20 JP	>= 24 JP	< 24 JP
Manajerial	Jabatan Pim pinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional	5	Proporsional
Manajerial	Jabatan Adm inistrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional	5	Proporsional
Manajerial	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional	5	Proporsional
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	-	10	0	-	-	5	Proporsional	5	Proporsional
Non Manajerial	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	Proporsional	5	Proporsional

Indikator dimensi **kinerja** yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT NILAI	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik		30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan	30	20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Indikator dimensi **disiplin** yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

DIMENSI	NAMA HUKUMAN DISIPLIN	BOBOT NILAI
DISIPLIN	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Bobot penilaian dimensi **Indeks Profesionalitas ASN** terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
- Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
- Kinerja memiliki bobot 30% (empat puluh persen); dan
- Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi **Indeks Profesionalitas ASN**, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

Kategori penilaian **Indeks Profesionalitas ASN**, yaitu:

NILAI	KATEGORI
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Sumber : Manual IK Triwulan I tahun 2026

Bukti dukung berupa: surat penyampaian Hasil Nilai IP ASN dari Sekretariat BPPSDM KP

Tabel 43. Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)

Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)									
Realisasi				Triwulan I TA. 2026				Rancangan IK Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	83.00	0.00

Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, Triwulan I tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada triwulan I tahun 2026 target dan capaian belum ada karena pengukuran kinerja dilakukan pengukuran kinerja dilakukan persemester tahun 2026.

Apabila melihat capaian pada tahun 2022-2025 diatas belum ada capaian dan capaian IK ini belum bisa dibandingkan dengan Satker lain lingkup Pusluh indikator tersebut karena pengukuran kinerja dilakukan persemester tahun 2026.

Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja: Pemantauan data Indek Profesionalitas ASN dan Penyusunan laporan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai.

Anggaran yang mendukung IKK Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks) adalah RO Layanan Manajemen SDM (Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Riset Perikanan) dengan anggaran Rp. 2.800.000,- dan belum ada realisasi, sehingga NPPS dan NKO belum ada.

INDIKATOR KINERJA 13

NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL BRPBAPPP (NILAI)

Definisi dari indikator ini adalah Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.

Formula Perhitungannya adalah Pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%): a) penciptaan arsip (25%), b) penggunaan arsip (25%), c) pemeliharaan arsip (25%), dan penyusutan arsip (25%).
2. Sumber Daya Kearsipan (bobot 50%): a) sumber daya manusia kearsipan (50%) dan b) prasarana dan sarana (50%).

Bukti dukung berupa Surat/Nota Dinas Biro Umum - Sekretariat Jenderal KKP

Tabel 44. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPBAPPP (Nilai)

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBAPPP (Nilai)									
Realisasi				Triwulan I TA. 2026				Rancangan IK Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	0	0	0	0	0	85.00	0

Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, Triwulan I tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada triwulan I tahun 2026 target dan capaian belum ada karena pengukuran kinerja dilakukan pengukuran kinerja dilakukan akhir tahun/ triwulan IV tahun 2026.

Apabila melihat capaian pada tahun 2022-2025 diatas belum ada capaian dan capaian IK ini belum bisa dibandingkan dengan Satker lain lingkup Pusluh indikator tersebut karena pengukuran kinerja dilakukan akhir tahun 2026. Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja : Penyusunan ASKI dari Hasil Pengawasan Arsip.

Anggaran yang mendukung IKK Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks) adalah RO Layanan Manajemen SDM (Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Riset Perikanan) dengan anggaran Rp. 2.800.000,- dan belum ada realisasi, sehingga NPPS dan NKO belum ada.

INDIKATOR KINERJA 14

PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP BRPBAPPP (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana

Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formula Perhitungan :

$$C = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP

B = Pagu Pengadaan Barang/Jasa

C = Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini

Bukti dukung berupa Surat/Nota Dinas Biro Pengadaan Barang/Jasa dari Sekretariat Jenderal KKP.

Tabel 45. Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)									
Realisasi				Triwulan I TA. 2026				Rancangan IK Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	0	77.00	100.00	129.87	0.00	77.00	129.87

Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan I tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada triwulan I tahun 2026 capaian sebesar 100% dari targetnya sebesar 77% (120%), sedangkan tahun 2021-2024 belum ada capaian karena IK ini merupakan IK baru di tahun 2025. Target 2029 sebanyak 77% sehingga persentase capaian terhadap target 2029 sebanyak 129,87%.

Capaian berupa Nota Dinas Nomor 1428/BPPSDM.1/PL.410/IV/2026. Paket RUP Terumumkan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.817.145.000, RUP tidak ada selisih dari Paket RUP (0) dimana persentase RUP terumumkan sebesar 100% sehingga sudah sesuai.

No	Kode EI / Satker	Nama Satker	TERUMUMKAN	PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
12		BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	326,938,554,000	326,938,554,000			
1	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	990,954,000	990,954,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	403827	BBR BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,529,483,000	6,529,483,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	403835	BBR PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	4,985,346,000	4,985,346,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	403836	BBR SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,643,813,000	1,643,813,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	238755	BPPP AMBON	16,013,469,000	16,013,469,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	238762	BPPP BANYUWANGI	6,245,814,000	6,245,814,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239260	BPPP BITUNG	12,257,656,000	12,257,656,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	238741	BPPP MEDAN	4,518,648,000	4,518,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239188	BPPP TEGAL	39,950,140,000	39,950,140,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	653526	BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI	5,196,446,000	5,196,446,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	2,868,988,000	2,868,988,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	3,231,545,000	3,231,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2,104,748,000	2,104,748,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	403828	BRP BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,817,145,000	6,817,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	403829	BRP BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	7,759,499,000	7,759,499,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	1,093,050,000	1,093,050,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	403823	BRP PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,931,859,000	6,931,859,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	1,466,192,000	1,466,192,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	1,219,765,000	1,219,765,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	928,933,000	928,933,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	1,701,958,000	1,701,958,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

Gambar 10. Surat Penyampaian Hasil PBJ Triwulan I Tahun 2026

Sumber data : Surat Penyampaian Hasil PBJ Triwulan I Tahun 2026

Faktor keberhasilan IK ini yakni perencanaan yang tepat, pemahaman PPK dan admin, serta pemanfaatan teknologi informasi. SIRUP bertujuan untuk mempermudah pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja yakni :

- Penginputan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan capaian indikator kinerja BRPBAPPP untuk kedepannya, maka perlu dilakukan perbandingan persentase capaian pada indikator tersebut dengan satker yang lain. Satker yang akan dilakukan perbandingan adalah satker yang dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP. Berikut perbandingan capaian untuk indikator kinerja jika dibandingkan dengan Satker lingkup Pusat Penyuluhan KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 46. Perbandingan Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%) triwulan I tahun 2026 dengan Satker Lain.

No	Satuan Kerja	Capaian		
		Target	Realisas	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	77	100	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	77	100	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	77	100	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	77	100	120

Sumber : Sistem Aplikasi Kinerjaku <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata semua satker memiliki capaian 120%. Untuk kedepannya, diharapkan capaiannya dapat lebih ditingkatkan lagi salah satunya melalui pemantauan terhadap kinerja penyuluh perikanan agar tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Anggaran yang mendukung IKK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%) adalah RO Layanan BMN (Pelayanan Pengelolaan BMN Penyuluhan KP dengan anggaran Rp. 4.000.000,- dan tidak ada realisasi sehingga NPPS dan NKO belum ada.

INDIKATOR KINERJA 15

PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK (PROPOSAL)

Definisi dari inidikator kinerja ini adalah Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No.3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan KIPP Tahun 2023. Proposal inovasi disusun untuk dapat diajukan dan dinilai oleh tim penilai eselon I. Formula Perhitungannya adalah Proposal inovasi yang disusun dan diajukan kepada tim penilai eselon I dan ditetapkan dalam BA

panilaian oleh tim penilai eselon I. Bukti dukung berupa Proposal dan Surat Penyampaian.

Tabel 47. Capaian IK Proposal Inovasi Pelayanan Publik (Proposal)

Proposal Inovasi Pelayanan Publik (Proposal)									
Realisasi				Triwulan I TA. 2026				Rancangan IK Tahun 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada triwulan I tahun 2026 target dan capaian belum ada karena pengukuran kinerja dilakukan pengukuran kinerja dilakukan akhir tahun/ triwulan IV tahun 2026.

Apabila melihat capaian pada tahun 2022-2025 diatas belum ada capaian dan capaian IK ini belum bisa dibandingkan dengan Satker lain lingkup Pusluh indikator tersebut karena pengukuran kinerja dilakukan akhir tahun 2026. Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja : Penyusunan usulan Inovasi Publik.

Anggaran yang mendukung IKK Proposal Inovasi Pelayanan Publik (Proposal) adalah RO Layanan Humas (Pelayanan Humas Penyuluhan Kp) dengan anggaran Rp. 5.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 320.000,- Namun NKO dan NPPS belum ada.

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

Dalam rangka mendukung pencapain visi, misi dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2026 meliputi 2 (dua) program yaitu : Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan Program Dukungan Manajemen dengan rincian pagu kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.801.002.000,-
2. Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 110.706.640.000,- .

Untuk realisasi per tanggal 30 Maret 2026 realisasi anggaran adalah sebesar 27.156.893.984,- (23,45%),- yang berasal dari total pagunya sebesar Rp. 114.509.642.000,- Belanja pegawai realisasi sebesar Rp 25.661.721.022,- (24,43%),- dengan pagu sebesar Rp. 105.015.067.000,- Belanja barang realisasi sebesar Rp

1.496.193.327,- (15,75%) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.494.575.000,- Pada DIPA keluar tanggal 1 Desember 2025 pagu awal anggaran sebesar Rp. 114.509.642.000,- Revisi RPD Hal III DIPA pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 114.509.642.000,- Penambahan Pagu PNBPN pada tanggal 2 Maret 2026 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 115.814.061.000,- Revisi Program Direktif Presiden tanggal 31 Desember 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 114.509.642.000. Revisi POK 1 Percontohan Penyuluhan pada tanggal 4 Maret 2026.

Tabel 48. Pagu dan Anggaran Triwulan I Tahun 2026

NO	BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	105.015.067.000	25.662.721.022	24,43
2	Belanja Barang	9.494.575.000	1.496.193.327	15,76
3	Belanja Modal	0	0	0
TOTAL		114.509.642.000	27.158.914.349	23,72

Sumber : Data Realisasi Keuangan Triwulan I TA 2026

Tabel 49. Pagu dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025

NO	BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	81.233.143.000	21.801.845.412	26,84
2	Belanja Barang	15.863.628.603	2.643.628.603	16,66
3	Belanja Modal	0	0	0
TOTAL		97.096.937.000	24.445.474.015	25,18

Sumber : Data Realisasi Keuangan Triwulan I TA 2025

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran triwulan I tahun 2026 dengan anggaran triwulan I tahun 2025 menurun sebesar 1.46% dilihat secara keseluruhan hal ini karena program presiden berupa Program Pemerintah yakni Program Makan Bergizi Gratis.

Tabel 50. Revisi DIPA BRPBAPPP Triwulan I tahun 2026

No.	Uraian	Tanggal Terbit DIPA/ Revisi	Pagu (Rp.)	Keterangan
1	Pagu Awal	1 Desember 2025	114.509.642.000	DIPA Awal
2	Revisi ke 01	31 Desember 2025	114.509.642.000	Revisi RPD Hal III DIPA
3	Revisi ke 02	2 Maret 2026	115.814.061.000	Penambahan Pagu PNBPN
4	Revisi ke 03	4 Maret 2026	115.814.061.000	Revisi POK 1 Percontohan

Sumber : Bagian Anggaran RKAKL Triwulan I Tahun 2026

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan dari 2 (dua) Program yang dilaksanakan BRPBAPPP pada triwulan I tahun 2026, maka selanjutnya dijabarkan kedalam Aktivitas, Klasifikasi Rincian Output (KRO), dan Rincian Output (RO) sebagaimana berikut ini :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Kegiatan
 - 1) Pendidikan Kelautan dan Perikanan Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden, Rincian Output :
 - a. Pendampingan Masyarakat KP dalam mendukung Program Prioritas
 - 2) Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Klasifikasi Rincian Output :
 - a. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan kepada Kelompok Masyarakat KP (4633 Kelompok)
 - b. Penelitian dan Pengembangan Model, Percontohan Penyuluhan/Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang Diterapkan kepada Masyarakat KP (1 Model)
2. Program Dukungan Manajemen, Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output: Layanan Dukungan Manajemen Internal ada 3 Layanan yaitu :
 - a. Layanan Umum (1 Layanan)
 - b. Layanan Perkantoran (1 Layanan)
 - c. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (1 layanan)
 - d. Layanan BMN (1 Layanan)
 - e. Layanan Manajemen SDM (1 Layanan)
 - f. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 Layanan)
 - g. Layanan Manajemen Keuangan (1 Layanan)
 - h. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (1 Layanan)

Dalam mencapai target Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan di triwulan I tahun 2026 maka diperlukan alokasi anggaran untuk masing-masing Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan. Berikut adalah tabel realisasi anggaran berdasarkan Evaluasi Renaksi pada Aplikasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026.

Tabel 51. Evaluasi Renaksi pada Aplikasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja											
1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)											
	Renca na Aksi	Pag u Ang gara n	Bu la n	Ta rg et	Sat uan	Real isasi Angg aran	Real isasi Vol ume	Penjelas an Realisas i	Link Data Dukun g	Permasa lahan	Rekome ndasi	Tindak Lanjut
	Penda mpinga n dan Penyus unan profil Kelomp ok Pelaku Utama/ Pelaku Penduk ung	2,15 8,86 4,00 0		19 5	Kelo mpo k	269,4 85,21 5	6	Capaian IKU ini mencapa i 6 kelompok dari target tw 1 yakni 5 kelompok	https://d ocs.goo gle.com /spread sheets/ d/17V4 Bax2O CiIEEf2 2SrDim Pq- le1N9Q kdjJsLs w-	Masih ada beberapa penyuluh kelompok utama/pe laku penduku ng yang belum sesuai dengan format PermenK P No 319 Tahun 2025	Mengem balikan data dukung yang masih keliru kepada penyuluh untuk memperb aiki yang dilengka pi dengan catatan perbaiki	Menung gu hasil perbaik an IKU naik kelas dari penyulu h
1	Verifik asi dan validas i Kelom pok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendu kung yang Ditingk atkan kelasn ya oleh BRPB APPP	-		4	Do ku me n	-	1	Sudah dilakuka n verval oleh Tim Monev balai dengan Tim Monev Pusluh	https:// drive.g oogle. com/dr ive/u/0 /folder s/1kdN 1fSmM 7y2Pk SrsyCl O2BY 715IU YRI	1. kelompok usaha fatma, cek kembali jumlah nilai umum(seharus nya 356) 2. Kelomp ok Torombi a Jaya blm ada score lama 3. Bidang usaha agar disesuai kan (no 2-7)	Member itahukan kepada penyulu h melalui media komunik asi mengen ai koreksi dari IKU Naik Kelas	Menun gggu hasil perbaik an IKU Naik Kelas dari Penyul uh disesu aikan Format di dalam Manual IKU
2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)											

	Renca na Aksi	Pag u Ang gar an	B ul a n	T ar g et	Sat uan	Real isasi Angg aran	Re alis asi Vol um e	Penjelas an Realisas i	Link Data Dukun g	Permas alahan	Rekome ndasi	Tindak Lanjut
	Penilai an dan Pengu kuhan Kelas Kema mpuan Kelom pok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendu kung	-		5 3 0 8	Kel om pok	-	600	Capaian IKU ini mencap ai 600 kelompo k dari target tw 1 yakni 500 kelompo k	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QW5Y18vHdtXzS8HhfNX0Dm5CGwaeShYtCLHiPOH9XRse/dit?gid=56779279#gid=56779279	Masih ada beberapa pendam pingan dan penyusu nan profil kelompo k pelaku utama/p elaku penduku ng yang belum sesuai dengan format Permen KP No 319 Tahun 2025	Menge mbalika n profil yang masih keliru kepada penyulu h untuk memper baiki yang dilengka pi dengan catatan perbaiki	Menun gg u hasil perbaik an profil dari penyul uh
	Verifik asi dan validas i Kelom pok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendu kung yang Disulu h oleh BRPB APPP (Kelom pok)	-		4	Do ku me n	-	1	Sudah dilakuka n verval oleh Tim Monev balai dengan Tim Monev Pusluh	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gUqdAMxLSJpmbQ4ZVzhZn7DgfA0cZzJ	Piagam penguku han masih mencant umkan nama bidang usaha (4 kelompo k); no reg msh salah (7 kelompo k); jumla h anggota kelompo k msh salah (7 kelompo k); profil tdk bisa di buka no 559 (kentaqi u food)	Member itahkan kepada penyulu h melalui media komunik asi mengen ai koreksi dari IKU Disuluh	Menun gg u hasil perbaik an dari penyul uh menge nai IKU yang disuluh

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)												
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukungan	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
3	Pembentukan Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung	-		676	Kelompok	-	19	Capaian IKU ini mencapai 19 kelompok dari target 21 yakni 15 kelompok	https://sites.google.com/view/brpbap3maros/halaman-muka	Masih ada beberapa kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yg tidak sesuai format Permen KP dalam hal profil pembentukan kelompok	Mengembalikan profil yang masih keliru kepada penyuluh untuk memperbaiki yang dilengka pi dengan catatan perbaikan	Menunggu hasil perbaikan profil dari penyuluh
	Verifikasi dan validasi Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP	-		4	Dokumen	-	1	Sudah dilakukan verval oleh Tim Monev Balai dengan Tim Monev Pusluh	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gjSL8fj9tf6gp3Uys5-nr0jwYMKQ_5xL	Beberapa nama kelompok masih blm sesuai; Beberapa jumlah anggota kurang sesuai; kelompok masih bidang usaha blm sesuai huruf kapital; beberapa no surat pengesahan kurang sesuai 6.1 daduk tdk ada isi	Memberitahukan kepada penyuluh melalui media komunikasi mengenai koreksi dari IKU Dibentuk	Menunggu hasil perbaikan dari penyuluh mengenai IKU yang Dibentuk

Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBAPPP (Unit)											
Renca na Aksi	Pag u Ang gar an	B ul a n	T ar g et	Sat uan	Real isasi Angg aran	Re alis asi Vol um e	Penjelas an Realisas i	Link Data Dukun g	Permas alahan	Rekome ndasi	Tindak Lanjut
4	Penda mping an dan Penyu sunan profil Gabun gan Kelom pok/Ko perasi/ Korpor asi yang Menda patkan Penda mping an di BRPB APPP	-	5 8	Uni t	-	0	Capaian IKU ini mencap ai 24 kelompo k dari target tw 1 yakni 20 kelompo k	https:// sites.g oogle. com/vi aw/brp bap3m aros/h alama n- muka	Masih ada beberapa kelompo k pelaku usaha/p elaku penduku ng yg tidak sesuai format Permen KP dalam hal profil pendam pingan dan penyusu nan profil gabung an kelompo k/kopera si	Menge mbalika n profil yang masih keliru kepada penyulu h untuk memper baiki yang dilengka pi dengan catatan perbaiki	Menun gg u hasil perbaik an profil dari penyul uh
	Verifik asi dan validas iGabu ngan Kelom pok dan/at au kopera si yang Menda patkan Penda mping an dari Penyul uh KP di BRPB	-	4	Do ku me n	-	1	Sudah dilakuka n verval oleh Tim Monev balai dengan Tim Monev Pusluh	https:// drive.g oogle. com/dr ive/u/0 /folder s/1t8S e4hPU 0l- hh1SH gJAF2 Mf43tV 0H1Ek	1. matriks tidak sesuai manual iku, Tidak ada kolom nama gapokan 2. Duplikas i no 7 dan 16 3. no 10 daduk akte kosong (file in owner trash)	Member itahukan kepada penyulu h melalui media komunik asi mengen ai koreksi dari IKU Gapokk an	Menun gg u hasil perbaik an dari penyul uh menge nai IKU Gapok kan

	APPP (Unit)									4. no 12 (m. syukri), 15 (aminah) dan 16 data dukung kosong (file in owner trash)		
5	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBAPPP (Paket)											
	Renca na Aksi	Pag u Ang gar an	B ul a n	T ar g et	Sat uan	Reali sasi Angg ar an	Re alis asi Vol um e	Penjelas an Realisas i	Link Data Dukun g	Permas alahan	Rekome ndasi	Tindak Lanjut
	Penyu sunan Media/ Materi penyul uhan	121 ,07 9,0 00		1	Pak et	-	0	Tidak ada capaian karena penguku ran dilakuka n akhir tahun	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan oleh BRPBAPPP (Model)											
	Renca na Aksi	Pag u Ang gar an	B ul a n	T ar g et	Sat uan	Reali sasi Angg ar an	Re alis asi Vol um e	Penjelas an Realisas i	Link Data Dukun g	Permas alahan	Rekome ndasi	Tindak Lanjut
	Penyu sunan Lapora n Percon tohan Penyul uhan Kelaut an dan Perika nan yang diterap kan oleh BRPB APPP	-		1	Lap ora n	-	0	Tidak ada capaian karena penguku ran dilakuka n akhir tahun	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)											
	Renca na Aksi	Pag u Ang	B ul a n	T ar g et	Sat uan	Reali sasi	Re alis asi Vol	Penjelas an Realisas i	Link Data Dukun g	Permas alahan	Rekome ndasi	Tindak Lanjut

		gar an				Angg aran	um e					
	Penyu sunan Usulan Penyul uh Perika nan yang mengi kuti penilai an Kompe tensi	1,5 21, 059 ,00 0		1	Do ku me n	-	0	Tidak ada capaian karena penguku ran dilakuka n akhir tahun	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)											
	Renca na Aksi	Pag u Ang gar an	B ul a n	T ar g et	Sat uan	Reali sasi Angg aran	Re alis asi Vol um e	Penjelas an Realisas i	Link Data Dukun g	Permas alahan	Rekome ndasi	Tindak Lanjut
	Peman tauan pada Aplika si SIDAK	8,4 00, 000		4	Do ku me n	-	1	Pemant auan pada Aplikasi SIDAK setiap triwulan Tahun 2026	https:// drive.g oogle. com/dr ive/fold ers/1M AtLljnr 94RG- 1xJ6r9 VwxCI 92zyb 7JQ	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Penyu sunan Lapora n SPIP Bulana n/Triw ulanan	-		4	Do ku me n	-	1	Penyus unan Laporan SPIP Bulanan /Triwula nan tahun 2026	https:// drive.g oogle. com/dr ive/fold ers/17 zHdQ1 jTLbsU 017pK _Y7bZ prvNR KWZB 1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Peman tauan Penge ndalia n MR	-		4	Do ku me n	-	1	Pemant auan Pengen dalian MR dilakuka n setiap triwulan Tahun 2026	https:// drive.g oogle. com/dr ive/fold ers/17 zHdQ1 jTLbsU 017pK _Y7bZ	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

									prvNR KWZB 1			
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	TARGET	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukungan	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Penginputan indikator penilaian IKPA di aplikasi OMSPAN	110,674,640,000		2	Laporan	26,886,878,769	0	Penginputan indikator penilaian IKPA di aplikasi OMSPAN dilakukan persemester	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Pengelolaan UP/TUP dan Penyelesaian tagihan	-		4	Dokumen	-	1	Pengelolaan UP/TUP dan Penyelesaian tagihan dilakukan pertriwulan tahun 2026	https://drive.google.com/drive/folders/14RZ1XlvKWnw77jvbVPFryL3w_pQvAL8	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Penyusunan Laporan Keuangan	-		1	Laporan	-	0	Penyusunan laporan keuangan dilakukan akhir tahun	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Penyenggaraan PIPK	-		1	Dokumen	-	0	Hasil laporan penyelenggaraan PIPK dilakukan akhir tahun	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)											
	Rencana Aksi	Pagu	Bul	Tar	Satuan	Realisasi	Realisasi	Penjelasan	Link Data	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut

		Ang gar an	a n	g et		Angg aran	Vol um e	Realisas i	Dukun g			
	Penyusunan Dokumen kinerja	4,000,000		5	Do ku me n	-	5	Telah tersusun dokumen perencanaan kinerja berupa Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Renaksi, Rencana Kerja Tahunan, Target IKU	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dKu-5-ek1UEZlgtD9MCpgF_To9VDUrPe	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Pengukuran capaian kinerja	-		4	Do ku me n	-	1	Telah dilakukan pengukuran capaian kinerja triwulan I Tahun 2026	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1e6ss_K6B5j9398R3UgkI-HMiCIf0ljeR	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Penyusunan laporan kinerja	-		4	Do ku me n	-	1	Telah dilakukan penyusunan laporan kinerja triwulan I Tahun 2026	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rWu4eKdCdh2hOmHa5gZKm_GLQ5w_R5tV	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Penilaian Mandiri SAKIP	-		1	Do ku me n	-	0	Penilaian Mandiri SAKIP akan dilakukan pada akhir tahun	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

	Penyusunan laporan Penilaian Mandiri SAKIP	-		1	Dokumen	-	0	Belum dilakukan penyusunan laporan Penilaian Mandiri SAKIP pada triwulan I Tahun 2026	tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	TARGET	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Penyusunan Laporan dari Aplikasi Monev Kemenkeu	7,600,000		1	Dokumen	210,000	0	Penyusunan Laporan dari Aplikasi Monev Kemenkeu dilakukan pada akhir tahun	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Laporan Capaian Output	-		1	Dokumen	-	0	Laporan Capaian Output dilakukan pada akhir tahun	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
12	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	TARGET	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Pemanfaatan data Indeks Profesionalitas ASN	2,800,000		2	Dokumen	-	0	Pemanfaatan data Indeks Profesionalitas ASN dilakukan pada semester	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

	Penyusunan laporan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai	-			4	Dokumen	-	1	Penyusunan laporan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai dilakukan pertriwulan	https://drive.google.com/drive/folders/1deaokvzjVb-UBBrFo2YSS71Brd8FNBAE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBAPPP (Nilai)												
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
	Penyusunan ASKI dari Hasil Pengawasan Arsip	2,000,000		1	Dokumen	-	0	Penyusunan ASKI dari Hasil Pengawasan Arsip belum dilakukan pada triwulan I Tahun 2026	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)												
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
	Penginputan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	4,000,000		4	Dokumen	-	1	Telah dilakukan Penginputan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengad	https://drive.google.com/drive/folders/1KvT_RZUzGD46EYso6dOb3qfKgcpWsw0	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

								aan pada triwulan I Tahun 2026				
15	Proposal Inovasi Pelayanan Publik (Proposal)											
	Renca na Aksi	Pag u Ang gar an	B ul a n	T ar g et	Sat uan	Real isasi Angg aran	Re alis asi Vol ume	Penjel as an Realisas i	Link Data Dukun g	Permas alahan	Rekome ndasi	Tindak Lanjut
	Penyu sunan usulan Inovasi Publik	5,2 00, 000		1	Do ku me n	320, 000	0	Belum dilakuka n Penyus unan usulan inovasi publik triwulan I Tahun 2026	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber Bagian Monev Evaluasi Renaksi pada Aplikasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Secara umum, kinerja BRPBAPPP sampai Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti:

1. Pelaksanaan kegiatan perkantoran manajerial telah berjalan lancar dan belum adanya perubahan OTK dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Pelaksanaan ROK tepat jadwal.
3. Jika ada persediaan Uang GU/TU segera memberitahukan kepada Penanggung Jawab untuk memasukan perencanaan secepatnya supaya bisa cepat diproses dan realisasi bisa tercapai.
4. Target tahun pada Indikator Kinerja tetap dipantau ketat sehingga bisa tercapai 100% pada akhir tahun 2026

D. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBERDAYA BRPBAPPP

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BRPBAPPP ditunjang oleh sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya keuangan. Sumber daya manusia terdiri atas tenaga fungsional perencanaan, APK APBN, penyuluh perikanan maupun tenaga fungsional lainnya dan tenaga administrasi. Sumber daya fisik berupa aset BRPBAPPP yang meliputi tanah, bangunan kantor, guest house, prosesing, hatchery, kolam percobaan, laboratorium, ruang pertemuan, dan perpustakaan. Sumber daya keuangan/pendanaan dalam pengelolaan kegiatan penyuluhan perikanan, dan

pemanfaatan aset untuk program pengembangan perikanan budidaya laut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pendanaan kegiatan pengembangan budidaya perikanan laut tahun 2026 berasal dari kegiatan kerjasama Balai dan pengelolaan hasil penjualan dari kegiatan lanjutan *Smart Fisheries Village* (SFV).

Bertitik tolak dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang klasifikasi potensi sumberdaya perikanan secara umum dibedakan menjadi sumber daya terbarukan (*renewable resources*) dan tidak terbarukan (*non-renewable resources*). Sumberdaya terbarukan meliputi perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, mineral air laut, air laut dalam, energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (*ocean thermal energy conversion*). Sementara sumber daya tidak terbarukan (*non-renewable resources*) terdiri dari minyak dan gas bumi serta berbagai jenis mineral yang terkandung didalamnya.

Potensi pengembangan budidaya perikanan laut memiliki prospek yang cukup tinggi untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta memiliki sumberdaya berbagai spesies ikan yang bernilai ekonomis penting. Komoditas potensial budidaya laut yang mempunyai daya saing tinggi dan prospektif untuk dikembangkan antara lain ikan tuna sirip kuning, ikan kakap putih, ikan kerapu, abalone, teripang, Kepiting dan lobster. Oleh karena itu, pemantauan mengenai berbagai aspek budidaya beberapa komoditas tersebut perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Prospek pengembangan perikanan sebagai unit usaha sangat terbuka lebar mengingat melimpahnya sumber daya ikan yang dapat dijadikan sebagai bahan atau modal awal usaha tersebut serta didukung oleh tersedianya paket teknologi perikanan yang tepat guna. Potensi SDM Penyuluh Perikanan yang tersebar di 47 kabupaten/kota di 3 Provinsi, yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat merupakan bagian dari perpanjangan tangan yang menjembatani perkembangan teknologi budidaya ikan laut yang dihasilkan oleh BRPBAPPP.

Efisiensi Anggaran

Hasil perhitungan efisiensi anggaran BRPBAPPP adalah hasil pengukuran yang akan didapatkan pada akhir tahun. Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai efisiensi anggaran pada BRPBAPPP yang mengacu pada tahapan BPPSDM yaitu :

- 1) Perencanaan, efisiensi anggaran dilakukan BPPSDM dalam beberapa dimensi, yaitu :
 - Dimensi efisiensi pertama mengutamakan manfaat. Oleh karena itu mengikuti arahan program pusat yakni melakukan kegiatan optimalisasi pemanfaatan asset dengan melaksanakan kegiatan lanjutan *Smart Fisheries Village (SFV)* sesuai dengan porsi anggaran yang diberikan dan tidak melaksanakan kegiatan belanja modal.
 - Dimensi efisiensi kedua berupa pengurangan kegiatan perjalanan dinas dan managerial internal balai melalui pemilihan kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan dengan penyesuaian berdasarkan komposisi anggaran managerial yang tersedia.
- 2) Pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam DIPA tahun anggaran 2026 secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, baik kegiatan penyuluhan perikanan, managerial dan kegiatan lanjutan *Smart Fisheries Village (SFV)* walaupun ada kebijakan efisiensi anggaran di beberapa komponen kegiatan pada DIPA BRPBAPPP dari awal tahun sampai akhir tahun anggaran.
- 3) Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan secara terukur, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan telah menyusun dokumen pelaporan dari beberapa komponen yang harus dilaporkan dan telah melakukan pemantauan, evaluasi terhadap semua kegiatan yang terselenggara selama kurun waktu tahun 2026, baik penyuluhan, managerial, kerjasama maupun kegiatan lanjutan *Smart Fisheries Village (SFV)*.
- 4) Penyesuaian Berdasarkan realisasi anggaran yang tercatat dari pagu DIPA rupiah murni BRPBAPPP telah dilakukan penyesuaian yang terarah berdasarkan tatanan operasional prosedur pengelolaan anggaran APBN dengan terverifikasi 4 (empat) kali revisi, sehingga dalam pengadministrasiannya hampir melebihi dari peraturan yang ada, akan tetapi realisasi anggaran dan target capaian kegiatan teridentifikasi baik dan mendapat respon positif berdasarkan catatan aplikasi kinerja.

Tabel 52. Perhitungan Efisiensi Anggaran BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2026

Unit Kerja	Jumlah IKU	NPSS	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	% Efisiensi Anggaran
BRPBAPPP	15 IKU	115	114,509,642,000	27.157.914.349	23,72	91,28

Sumber : Aplikasi Kinerja dan Omspan Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas jumlah IKU sebanyak 15 IKU dengan NPSS sebesar 115% dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 114509.642.000 dengan realisasi sebesar Rp. 27.157.914.349 (23,72%) dengan % Efisiensi anggaran sebesar 91,28%. Capaian anggaran ini relative stabil.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam.

Sebagai satker eks-riset yang masih dalam proses transformasi kelembagaan, BRPBAPPP sudah tidak lagi diperkenankan melakukan fungsi riset. Dan pada tahun 2025 BRPBAPPP fokus pada kegiatan Penyuluhan dan Pemanfaatan asset karena adanya Efisiensi Anggaran sehingga hanya kegiatan Manajerial yang berjalan. Namun demikian BRPBAPPP dengan sumberdaya manusia terampil, dibidang penyuluhan dan didukung oleh peralatan laboratorium dan survey yang tersedia, perlu untuk melakukan optimalisasi sumberdaya tersebut.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia seperti tenaga PPPK dan tenaga PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) yang ada di Laboratorium berperan aktif sebagai tenaga teknisi laboratorium dan sebagai tenaga pelatihan yang diadakan di laboratorium seperti melakukan pelatihan/seminar untuk anak PKL yang ada di Balai Maros serta adanya anak Magang Kemenakerhub sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja BRPBAPPP dan kadang berkolaborasi dengan orang BRIN sebagai narasumber. Dengan demikian, beberapa indikator kinerja dapat secara efisiensi tercapai terutama

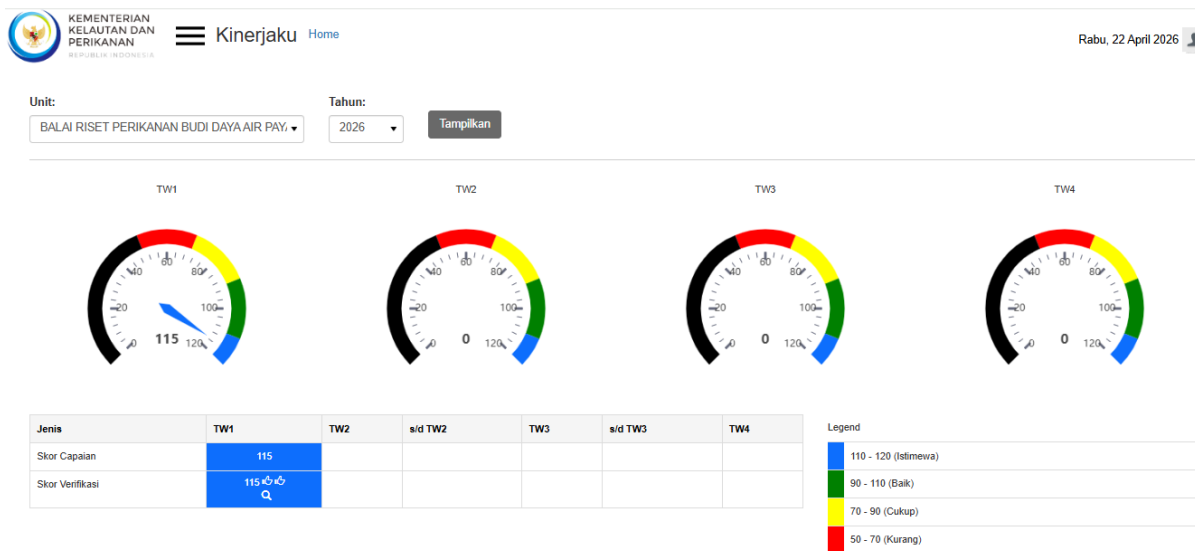
untuk indikator kinerja nilai PNBP dan Kemitraan. Selain itu, dengan adanya pengoperasian peralatan eks-riset yang tersedia.

Efisiensi asset juga dapat dicapai baik melalui mekanisme sewa alat laboratorium, sewa lahan tambak, dan lahan Balai yang awalnya sebagian dijadikan sebagai kegiatan untuk SFV yang dimanfaatkan untuk kegiatannya sehingga bisa menghasilkan dan mendukung capaian nilai PNBP dengan pemanfaatan asset maupun mekanisme Kemitraan. Selain itu, dengan tersedianya infrastruktur perkantoran seperti ruangan aula pertemuan, BRPBAPPP dapat memanfaatkan secara efisien melalui pemanfaatan ruangan dalam fasilitas kegiatan pertemuan yang dilaksanakan oleh lingkup BPPSDMKP.

BAB IV PENUTUP

A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pengukuran capaian kinerja BRPBAPPP triwulan I tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target tahunan, target triwulan tahun berjalan dan target triwulan tahun lalu dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indikator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Logical Framework Analysis* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPSDM di tingkat korporat triwulan I tahun 2026 sebesar 115%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Sumber : Aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2025

Gambar 11. Dashbaord Kinerjaku Level 3 BRPBAPPP

Tabel 53. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target DESEMBER	Capaian s/d DESEMBER	%	Target s/d DESEMBER	Capaian s/d DESEMBER	%
S.01	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						114,74			114,74	
IKSK.01.01	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4.580,00	4.580,00	5.500,00	120,00	4.580,00	5.500,00	120,00
IKSK.01.02	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	168,00	168,00	175,00	104,17	168,00	175,00	104,17
IKSK.01.03	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	497,00	497,00	535,00	107,65	497,00	535,00	107,65
IKSK.01.04	Gabungan Kelompok dan/ atau	Unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	43,00	43,00	52,00	120,00	43,00	52,00	120,00

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026 BRPBAPPP

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%	Target s/d DESEMBER	Capaian s/d DESEMBER	%
	Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP di BRPBAPPP (Unit)										
IKSK.01.05	Nilai PNBP Satker BRPBAPPP (Rupiah Miliar)	Rupiah Miliar	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0,94	0,94	1,03	109,57	0,94	1,03	109,57
IKSK.01.06	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di BRPBAPPP (Paket)	Paket	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	1,00	2,00	120,00	1,00	2,00	120,00
IKSK.01.07	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,00	3,00	4,00	120,00	3,00	4,00	120,00
IKSK.01.08	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5,00	5,00	12,00	120,00	5,00	12,00	120,00
IKSK.01.09	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP (Orang)	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	14,00	14,00	17,00	120,00	14,00	17,00	120,00
S.02	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						0,00			0,00	
S.02	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						113,06			113,06	
IKSK.02.01	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di BRPBAPPP (Dokumen)	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	1,00	2,00	120,00	1,00	2,00	120,00
IKSK.02.02	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	100,00	117,65	85,00	100,00	117,65
IKSK.02.03	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	92,00	98,46	107,02	92,00	98,46	107,02
IKSK.02.04	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	81,00	83,50	103,09	81,00	83,50	103,09
IKSK.02.05	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,50	71,50	100,00	120,00	71,50	100,00	120,00
IKSK.02.06	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	81,00	84,29	104,06	81,00	84,29	104,06
IKSK.02.07	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00	80,00	100,00	120,00
IKSK.02.08	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBAPPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	90,00	112,50	80,00	90,00	112,50
S.03	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						0,00			0,00	

Sumber : Data berdasarkan pada Aplikasi E Kinerja pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan telah menetapkan 2 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada triwulan I tahun 2026. Ketiga Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 Indikator Kinerja (IK). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh skor kinerja BRPBAPPP pada triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 115%, ada 6 IK yang memiliki capaian rata-rata sebesar 100%, 5 IK yang memiliki capaian lebih dari 100% berwarna biru dan 1 IK yang memiliki capaian sebesar 100%. Adapun rincian capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis, sesuai dengan nilai NKO :

1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, memiliki 7 Indikator Kinerja Pendukung, yaitu :

- a. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok) target triwulan I tahun 2026 sebesar 195 dimana target triwulan I tahun 2026 sebesar 5 kelompok, capaian sebesar 6 Kelompok (120%), berstatus Biru.
 - b. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok) target tahun 2026 sebesar 5308 kelompok, dimana target triwulan I tahun 2026 sebesar 500 kelompok, capaiannya sebesar 600 Kelompok (104,17%), berstatus biru.
 - c. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok) target tahun 2026, dimana target triwulan I sebesar sebesar 15 kelompok, capaian sebesar 19 kelompok (120%), berstatus Biru.
 - d. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBAPPP (Unit) target tahun 2026, dimana target triwulan sebesar 20 unit, capaiannya sebesar 24 Unit (120%), berstatus biru.
 - e. Media Penyuluhan Terstandar yang disusun di BRPBAPPP (Paket) target tahun 2026 sebesar 1 Paket. Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.
 - f. Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Model) target tahunannya sebesar 1 Model. Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.
 - g. Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang) target tahun 2026 sebesar 6 orang. Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, memiliki 8 Indikator Kinerja Pendukung, yaitu :
- a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%), target tahun 2026 sebesar 86% dan capaiannya sebesar 86% (100%) berstatus hijau.

- b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai) target tahun 2026 sebesar 92 Nilai Pengukurannya dilakukan persemester sehingga belum ada capaian.
- c. Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai), target tahun 2026 sebesar 81 Nilai dan Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.
- d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai), target tahun 2026 sebesar 71,75 Nilai dan Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.
- e. Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks), target tahun 2026 sebesar 82 Indeks dan Pengukurannya dilakukan persemester sehingga belum ada capaian.
- f. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBAPPP (Nilai), target tahun 2026 sebesar 71 Nilai. Pengukurannya dilakukan akhir tahun sehingga belum ada capaian.
- g. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%), target tahun 2026 sebesar 77% dan capaian sebesar 100% (120%), berstatus biru.
- h. Proposal Inovasi Pelayanan Publik (Proposal), target tahun 2026 sebesar 1 Proposal dan belum ada capaian.

Capaian kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan sampai dengan triwulan I tahun 2026 merupakan kontribusi dari seluruh Tim Kinerja BRPBAPPP.

B. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Selama tahun anggaran triwulan I tahun 2026 ada beberapa permasalahan yang dihadapi BRPBAPPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yakni :

1. IKU dengan target tahunan Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan perlu pengawalan yang ketat, disiplin dengan baik sehingga bisa dipastikan bahwa capaian akhir tahun dapat meningkat capaiannya sesuai target yang telah ditetapkan.
2. IKU yang memiliki capaian yang berwarna hijau dengan capaian 90-110 diusahakan untuk bisa memiliki capaian Istimewa (biru) dengan capaian lebih dari

120% dengan melakukan monitoring agar tidak terjadi penurunan pada tahun berikutnya.

C. SARAN DAN REKOMENDASI

1. Melaksanakan pemantauan secara rutin terhadap capaian seluruh Indikator Kinerja melalui pengukuran capaian kinerja setiap triwulan dan laporan kinerja setiap triwulan.
2. Memastikan Katimja Manajerial dan Katimja Penyuluhan dapat meingkatkan capaiannya yang memiliki tanggung jawab Indikator Kinerja dan bisa meningkatkan capaiannya untuk tahun berikutnya.

D. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I tahun 2026 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk triwulan I tahun 2026 bahkan terdapat 5 IK yang capaiannya memiliki kategori istimewa atau tercapai 120% dan. ada 1 IK yang memiliki capaian berwarna hijau yakni : 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%). Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya, namun BRPBAPPP tetap melakukan tuisi sesuai dengan arahan dan pendanaan dari pusat. Pada kontrak kinerja terdapat peta strategi (strategy map) dengan 2 sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Semua IKU yang telah ditargetkan mampu direalisasikan 100% bahkan beberapa telah tercapai jauh melebihi ekspektasi Balai pada triwulan I tahun 2026.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan secara optimal berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai pada tahun ini diharapkan dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan pada triwulan selanjutnya. Sementara untuk beberapa program/kegiatan yang capaian kinerja yang pengukuran kinerja dilakukan pada akhir tahun diharapkan bisa tercapai dengan selalu mengingatkan para penanggung jawab kegiatan sehingga bisa optimal capaian kinerja

pada triwulan I tahun 2026. Sehingga untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Balai, masih perlu dilakukan perbaikan sarana dan penambahan sarana selain itu diperlukan dukungan seluruh SDM yang ada dan masyarakat sekitar, melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat.

Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan sehingga capaian kinerja dari BRPBAPPP ini tidak hanya menjadi laporan saja, namun diharapkan benar-benar dapat memberikan dampak serta dapat bermanfaat untuk masyarakat.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja triwulan I tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRPBAPPP. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRPBAPPP serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkup BRPBAPPP. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah BRPBAPPP ini, sehingga diharapkan capaian kinerja Balai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

L A M P I R A N

PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN
PENYULUHAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Indra Jaya Asaad**
Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : **Yayan Hikmayani**
Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Yayan Hikmayani

Ditandatangani
Secara Elektronik

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Perikanan
Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan



A. Indra Jaya Asaad

Ditandatangani
Secara Elektronik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN
PENYULUHAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	195
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	5308
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	676
		4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBAPPP (Unit)	58
		5	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBAPPP (Paket)	1
		6	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan oleh BRPBAPPP (Model)	1
		7	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)	6
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	92,1
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	81
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	71,75
		12	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	82
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBAPPP (Nilai)	71
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	77
		15	Proposal Inovasi Pelayanan Publik (Proposal)	1

Data Anggaran

No.	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	3.228.585.000
2	Program Dukungan Manajerial	111.221.057.000
Total Anggaran Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan		114.509.642.000

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Perikanan
Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Indra Jaya Asaad